



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat terselesaikan dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Kalimantan Timur. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan "*selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*" dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPD Kepala Daerah kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat.

LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 4 (empat) substansi pokok capaian kinerja disajikan, yaitu: (1) capaian kinerja penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), (2) capaian realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2019, (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas

pembantuan, dan (4) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2020 selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 juga secara teknis berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 perihal Penyampaian pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2020. Dengan demikian penyajiannya secara maksimal telah memenuhi semua aspek, fokus dan indikator yang ditetapkan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni, dan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2020 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela,

Kubangun dengan Iman, Kujaga dengan Amal, dan Kubela dengan

Doa

Balikpapan, 31 Maret 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN

H.M RIZAL EFFENDI, SE

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 PENJELASAN UMUM	1
A. Undang – Undang Pembentukan Daerah	1
B. Data Geografis Wilayah	3
C. Jumlah Penduduk	4
D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	10
E. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	11
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	14
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	15
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	15
C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	25
D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	34
1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	114
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	119
2.1. Capaian Kinerja Makro	119
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	119
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	120
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	120
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan	120
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	120
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	123
3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA.	123
3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA	123
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	124
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	124
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi	124
4.1.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran	126
4.1.3 Permasalahan dan Solusi	132
4.2 URUSAN KESEHATAN	133
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi	133
4.2.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran	139
4.2.3 Permasalahan dan Solusi	140
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM	151

4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi	151
4.3.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	151
4.3.3	Permasalahan dan Solusi.....	152
4.4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	152
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi	152
4.4.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran	154
4.4.3	Permasalahan dan Solusi.....	154
4.5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	156
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi	156
4.5.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran	159
4.5.3	Permasalahan dan Solusi.....	160
4.6	URUSAN SOSIAL	162
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi	162
4.6.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran	166
4.6.3	Permasalahan dan Solusi.....	167
BAB V PENUTUP.....		170



BAB I - PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis yuridis, dasar pembentukan Kota Balikpapan sejak awal pendiriannya setelah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 55/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 2 Februari 1969 Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
- 5) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

- 6) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 384 Tahun 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
- 7) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 140/SK.149/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Penetapan Pemecahan Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
- 8) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 146/SK.144/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Administratif Tarakan Kabupaten Daerah TingkatII Bulungan dan Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
- 10) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan 5 (Lima) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan Definitif;
- 11) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7);
- 12) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8).

B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 1° LS - 11° LS dan diantara 116°50' BT - 117 5° BT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan.

Secara Topografi Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang ± 85% dengan jenis tanah *podsolik* merah kuning (*haplik*) dan mempunyai lapisan *topsoil* yang tipis serta struktur tanah mudah tererosi. Daerah dataran hanya ±15% yang terletak di sepanjang Pantai Timur dan Selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah Alluvial. Sedangkan kawasan pinggiran kota banyak terdapat lembah dan rawa yang merupakan Daerah Aliran Sungai Wain dan Manggar Besar.

Kota Balikpapan memiliki potensi sumber daya alam yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan budidaya maupun nonbudidaya. Yang dapat dilakukan budidaya antara lain kawasan wilayah perkotaan dan sebagian kecil adalah wilayah pinggiran dengan kendala limitasi pengelolaan wilayah, kawasan lainnya adalah potensi sumber daya laut dan pantai sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai. Saat ini kawasan tersebut telah dilakukan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan ruang hidup bagi masyarakat sesuai dengan peruntukkan wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kawasan wilayah perkotaan saat ini sangat dirasakan mengalami tekanan yang berat terhadap daya dukung lingkungan sehubungan dengan tingginya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan dampak banjir dan rawan terjadinya tanah longsor. Sedangkan pada kawasan pantai sebagian telah dilakukan penguasaan dan okupasi oleh masyarakat, bilamana tidak dilakukan pengaturan dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem pantai.

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW 2011-2031 adalah 857,81 km², yang terdiri dari luas daratan 538,44 km² dan luas pengelolaan lautan 319,37 km².

Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa luas lahan menurut jenis penggunaan(kawasan budidaya dan kawasan nonbudidaya) sebagai berikut:

- Kawasan Komersial dengan luas 1.054,36ha yang terdiri dari Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri;
- Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan luas 3.147,32 ha;
- Kawasan Wisata dengan luas 34,95ha;
- Kawasan Militer dengan luas 120,33ha;
- Kawasan Khusus dengan luas 5.156,02 ha;
- Kawasan Lindung dengan luas 15.175,45ha;
- Kawasan Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan dengan luas 6.460 ha;
- Kawasan Campuran dengan luas 31.148,43 ha.

Iklim di Kota Balikpapan termasuk dalam tipe iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi serta tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Adapun iklim di Kota Balikpapan sebagai berikut:

- a) Balikpapan mempunyai kelembaban udara berada pada kisaran kelembaban sedang-tinggi yaitu antara 82 - 91%;
- b) Curah hujan di Kota Balikpapan sangat bervariasi menurut bulan. Rata-rata curah hujan tertinggi dan terendah berada pada kisaran 64,4 mm – 338,0 mm;
- c) Secara umum Kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun berkisar 21,8°C sampai 35,7°C;
- d) Tekanan Udara (*atmospherric pressure*) 1.010,5 mb;
- e) Kecepatan Angin (*wind velocity*) 4 – 7,1 knot;
- f) Rata-rata penyinaran Matahari yang terjadi di Kota Balikpapan setiap bulannya berkisar antara 27,8 – 79,9 %.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 697.079 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 26.574 jiwa dari tahun sebelumnya. Lebih lengkap Data

komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L+P
1	Balikpapan Timur	46.431	43.563	89.994
2	Balikpapan Barat	49.646	46.625	96.271
3	Balikpapan Utara	86.941	83.051	169.992
4	Balikpapan Tengah	54.687	52.853	107.540
5	Balikpapan Selatan	74.904	72.109	147.013
6	Balikpapan Kota	44.034	42.235	86.269
JUMLAH		356.643	340.436	697.079

Sumber data : Disdukcapil Kota Balikpapan, DKB Desember 2020

Data Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum/Tidak Bekerja	106,966	89,592	196,558
2	Mengurus Rumah Tangga	7	143,994	144,001
3	Pelajar/Mahasiswa	66,924	56,479	123,403
4	Pensiunan	3,199	779	3,978

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pegawai Negeri Sipil	4,531	4,012	8,543
6	Tentara Nasional Indonesia	3,566	56	3,622
7	Kepolisian RI	2,911	176	3,087
8	Perdagangan	225	71	296
9	Petani/Pekebun	4,684	611	5,295
10	Peternak	73	1	74
11	Nelayan/Perikanan	2,387	5	2,392
12	Industri	10	6	16
13	Konstruksi	11	1	12
14	Transportasi	55	2	57
15	Karyawan Swasta	94,693	29,421	124,114
16	Karyawan BUMN	1,948	628	2,576
17	Karyawan BUMD	193	86	279
18	Karyawan Honorer	1,100	1,162	2,262
19	Buruh Harian Lepas	28,408	273	28,681
20	Buruh Tani/Perkebunan	205	35	240
21	Buruh Nelayan/Perikanan	192	1	193
22	Buruh Peternakan	3	1	4
23	Pembantu Rumah Tangga	52	551	603
24	Tukang Cukur	33	0	33
25	Tukang Listrik	5	0	5
26	Tukang Batu	155	1	156

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Tukang Kayu	307	0	307
28	Tukang Sol Sepatu	8	0	8
29	Tukang Las/Pandai Besi	103	0	103
30	Tukang Jahit	249	109	358
31	Tukang Gigi	4	0	4
32	Penata Rias	6	38	44
33	Penata Busana	0	3	3
34	Penata Rambut	24	38	62
35	Mekanik	861	0	861
36	Seniman	43	7	50
37	Tabib	1	0	1
38	Paraji	1	0	1
39	Imam Mesjid	10	0	10
40	Pendeta	141	14	155
41	Pastor	3	0	3
42	Wartawan	76	34	110
43	Ustadz/Mubaligh	96	4	100
44	Juru Masak	11	1	12
45	Anggota DPR-RI	0	1	1
46	Anggota DPD	2	0	2
47	Walikota	1	0	1
48	Anggota DPRD Provinsi	3	0	3

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	15	8	23
50	Dosen	260	237	497
51	Guru	1,618	3,822	5,440
52	Pilot	3	0	3
53	Pengacara	59	27	86
54	Notaris	12	40	52
55	Arsitek	18	4	22
56	Konsultan	50	17	67
57	Dokter	297	486	783
58	Bidan	0	449	449
59	Perawat	235	741	976
60	Apoteker	26	109	135
61	Psikiater/Psikolog	1	4	5
62	Penyiar Radio	1	1	2
63	Pelaut	465	1	466
64	Peneliti	4	0	4
65	Sopir	3,814	0	3,814
66	Pialang	2	1	3
67	Pedagang	8,073	1,700	9,773
68	Perangkat Desa	2	1	3
69	Biarawati	0	9	9
70	Wiraswasta	16,617	4,281	20,898

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	Lainnya	585	305	890
		356,643	340,436	697,079

Sumber data :Disdukcapil Kota Balikpapan, DKB Desember 2020

Berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2020 sebagian besar penduduk Kota Balikpapan adalah SLTA, yang mencapai 215,653 jiwa. Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak / Belum Sekolah	174,547
2	Belum Tamat SD/Sederajat	56,094
3	Tamat SD	95,617
4	SLTP Sederajat	89,226
5	SLTA Sederajat	215,653
6	D I / D II	1,286
7	D III	17,599
8	S I	44,794
9	S II	2,218
10	S III	45
JUMLAH		697,079

Sumber data :Disdukcapil Kota Balikpapan, DKB Desember 2020

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Balikpapan Timur	Manggar
		Manggar Baru
		Lamaru
		Teritip
2	Balikpapan Selatan	Damai Baru
		Damai Bahagia
		Sepinggian Baru
		Sungai Nangka
		Sepinggian Raya
		Gunung Bahagia
3	Balikpapan Tengah	Sepinggian
		Gunung Sari Ilir
		Gunung Sari Ulu
		Mekar Sari
		Karang Rejo
		Sumber Rejo
4	Balikpapan Utara	Karang Jati
		Gunung Samarinda
		Muara Rapak

No	Kecamatan	Kelurahan
		Batu Ampar
		Karang Joang
		Gunung Samarinda Baru
		Graha Indah
5	Balikpapan Barat	Baru Ilir
		Margo Mulyo
		Marga Sari
		Baru Tengah
		Baru Ulu
		Kariangau
6	Balikpapan Kota	Prapatan
		Telaga Sari
		Klandasan Ulu
		Klandasan Ilir
		Damai

E. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini terdiri dari pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta kecamatan. Untuk Kelurahan yang dulunya adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perangkat Kecamatan (bukan SKPD mandiri).

Berikut jumlah Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020.

Tabel 1.5

Jumlah Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Perangkat Daerah		Jumlah PNS			Jumlah Tenaga Bantuan		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	Sekretariat Daerah		95	54	149	45	23	68
2	Inspektorat		19	26	45	3	2	5
3	Sekretariat DPRD		19	8	27	16	8	24
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		23	21	44	1	3	4
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		149	8	157	126	9	135
6	Badan Pengelola Keuangan Daerah		25	28	53	127	43	170
7	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah		54	17	71	21	11	32
8	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan		22	16	38	0	3	3
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		22	12	34	23	14	37
10	A	Dinas Kesehatan	90	445	535	125	290	415
	B	RSKB Sayang Ibu	6	47	53	9	71	80
	C	Rumah Sakit Umum Daerah	30	82	112	97	176	273

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			Jumlah Tenaga Bantuan		
		L	P	L+P	L	P	L+P
11	Dinas Ketenagakerjaan	8	15	23	4	1	5
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12	12	24	10	4	14
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian	14	17	31	7	6	13
14	Dinas Lingkungan Hidup	46	19	65	560	249	809
15	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	43	32	75	27	12	39
16	Dinas Pekerjaan Umum	43	21	64	172	11	183
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	6	23	29	7	21	28
18	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	21	16	37	34	14	48
19	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu	26	30	56	17	17	34
20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	543	1534	2077	531	1293	1824
21	Dinas Perdagangan	44	21	65	96	31	127
22	Dinas Perhubungan	107	11	118	72	17	89
23	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	10	15	25	8	12	20
24	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	26	11	37	10	1	11
25	Dinas Perumahan Dan	20	13	33	334	119	453

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS			Jumlah Tenaga Bantuan		
		L	P	L+P	L	P	L+P
	Permukiman						
26	Dinas Sosial	16	15	31	8	8	16
27	Satpol PP	151	13	164	37	19	56
28	Kantor Kesbangpol	9	3	12	3	1	4
29	Kec Balikpapan Barat	39	21	60	29	23	52
30	Kec Balikpapan Kota	26	23	49	19	20	39
31	Kec Balikpapan Selatan	43	28	71	29	32	61
32	Kec Balikpapan Tengah	30	32	62	27	14	41
33	Kec Balikpapan Timur	30	14	44	26	20	46
34	Kec Balikpapan Utara	38	23	61	28	21	49
JUMLAH		1905	2726	4631	2688	2619	5307

Sumber data: BKPSDM Kota Balikpapan, 2020

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah kota Balikpapan dalam melaksanakan penganggaran mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Berikut Tabel Realisasi belanja APBD Kota Balikpapan tahun 2020 :

Tabel 1.6.

Realisasi Belanja APBD Tahun 2020

No	Realisasi Belanja APBD Tahun 2020		Total Belanja Tahun 2020	Ket
	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung		
1	1,055,412,233,586.01	866,810,730,192.31	1,922,222,963,778.32	<i>unaudited</i>

Sumber data: Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2020

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis pemerintah daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Perluasan Lapangan Kerja.
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Adaptif terhadap Perubahan Iklim dan Berketahanan Bencana
3. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berorientasi pada Konsep Hijau (*Green City*)
4. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Berwawasan Lingkungan (*Green Economy*)
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kota Balikpapan jangka panjang 20 tahun kedepan sebagai mana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2005–2025. Penetapan Visi dan Misi jangka panjang tersebut setelah menerima banyak masukan dari berbagai pihak khususnya pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan yang lalu. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya antar lain: analisis kondisi umum Daerah yang berlaku saat ini, prediksi kondisi umum Daerah yang diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang, mandate masyarakat dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat tentang kemana arah dan kebijakan Kota hendak dituju pada masa yang akan datang.

Visi jangka panjang Kota Balikpapan untuk 20 tahun kedepan, adalah;

“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Lima Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan & Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman”

Kota Jasa

Sejak awal perkembangannya sampai dengan saat ini dan perkembangan Balikpapan kedepan dapat dipastikan bahwa kota ini berkembang sebagai Kota Jasa. Keberadaan infrastruktur berbagai moda perhubungan, keberadaan kantor-kantor pelayanan skala Kalimantan Timur dan Kalimantan, ketiadaan sumber daya alam yang dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang

perkotaan lainnya memperkuat fungsi Kota Balikpapan sebagai Kota Jasa. Skala pelayanan jasa Kota Balikpapan tidak hanya meliputi lingkup Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga meliputi wilayah Kalimantan bahkan Indonesia bagian Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan pada saat ini akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*).

Kota Industri

Pengeboran minyak pertama di sumur Mathilda oleh perusahaan JH Menten dan Firma Samuel And Co pada tanggal 10 Februari 1897, merupakan momentum penting bagi Balikpapan untuk menjadi Kota Industri yang sampai dengan saat ini berkembang menjadi industri pengolahan minyak terbesar diluar pulau jawa.

Keberadaan kilang minyak ini berperan strategis untuk mensuplai kebutuhan migas khususnya di Indonesia Timur. Dalam perkembangannya kegiatan industri di Kota Balikpapan semakin tumbuh baik kegiatan industri yang mendukung industri pengolahan minyak tersebut maupun kegiatan industry lainnya seperti industry galangan kapal, perkayuan, bahan bangunan dan lain-lain.

Dipersiapkannya lahan seluas 9 ha untuk relokasi industri tahu tempe dan industri kecil lainnya serta ditetapkannya Kawasan Industri Kariangau pada RTRW 2005-2015 seluas 2.189 ha dan lebih diperluas lagi menjadi 2.721 ha pada RTRW 2012-2032 akan semakin memperkuat posisi Kota Balikpapan sebagai Kota Industri.

Kota Perdagangan

Fungsi Kota Balikpapan sebagai kota perdagangan diawali dari para saudagar bugis yang melakukan aktivitas perdagangan di kawasan pesisir kampung baru. Kemudian dibangun dan difungsikannya pelabuhan Semayang Balikpapan sebagai pintu masuk dan keluarnya barang, orang dan jasa serta berkembangnya berbagai fasilitas perdagangan di Kota Balikpapan semakin memperkuat fungsi Balikpapan sebagai Kota Perdagangan. Fungsi pelayanan perdagangan Kota Balikpapan tidak hanya mencakup wilayah Balikpapan tetapi mencakup pula wilayah Kalimantan Timur. Dibangunnya dan dikembangkannya pelabuhan petikemas kariangau dan diperluasnya berbagai

fasilitas Bandar Udara Sepinggian akan semakin memperluas cakupan pelayanan perdagangan Kota Balikpapan.

Kota Pariwisata

Keberadaan Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan kota transit mendorong kota ini berkembang menjadi Kota Pariwisata, yang pada awalnya lebih berfungsi sebagai pendukung sector pariwisata wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu di Kota Balikpapan banyak tersedia fasilitas penginapan dan restoran serta berkembangnya bisnis biro perjalanan. Posisi geografis Balikpapan yang memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 45,6 km, banyaknya peninggalan sejarah di kotaini dan komitmen yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mengarahkan Balikpapan mengembangkan berbagai objek pariwisata. Rencana pembangunan *coastal road*, pengelolaan Teluk Balikpapan dan pelestarian mangrove dan pesisir pantai akan semakin menumbuhkembangkan sektor pariwisata Kota Balikpapan.

Kota Pendidikan & Budaya

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjadikan warga Kota Balikpapan menjadi tuan di rumah sendiri, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mengembangkan berbagai lembaga dan fasilitas pendidikan. Ditetapkannya Balikpapan sebagai kota vokasi Pemerintah Kota mengembangkan sekolah-sekolah menengah kejuruan dan SMK Model serta membangun Politeknik Balikpapan. Komitmen Pemerintah Kota ini didukung pula oleh peran sektor swasta yang juga turut mengembangkan lembaga pendidikan yang cukup berkualitas baik formal maupun informal. Pada perkembangan selanjutnya Politeknik Balikpapan didukung Pemerintah pusat menjadi Politeknik Negeri. Dorongan dari Pemerintah Pusat untuk membangun dan mengembangkan Institut Teknologi Kalimantan akan semakin memperkuat peran dan fungsi pelayanan Kota Balikpapan sebagai kota pendidikan.

Heterogenitas penduduk Kota Balikpapan merupakan potensi berkembangnya Balikpapan sebagai Kota Budaya. Keberadaan ratusan paguyuban yang tumbuh di kotaini, berikut pembinaannya yang dilakukan pemerintah kota serta dibangunnya fasilitas gedung kesenian, merupakan pilar-pilar yang menopang Balikpapan sebagai Kota Budaya.

Madinatul Iman

Madinatul Iman bermakna bahwa Balikpapan menjadi pusat peradaban maju dengan landasan Iman sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Madinah (Madinat) atau madani mengandung makna suatu kota yang masyarakatnya berperadaban maju, ditingkatkan kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk (multi etnis, multi agama dan multi budaya). Masyarakat dalam Madinatul Iman merupakan Masyarakat Madani atau masyarakat yang berperadaban maju yang didukung oleh pemerintahan yang baik, dan menjadikan Iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut maka ditetapkan visi jangka menengah yang merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2016 – 2021, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016, sebagai acuan operasional pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan, yaitu:

"MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN"

Penjelasan visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka

Suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran).

Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan *Coastal Road*, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai

pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur.

Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

b) Nyaman Dihuni

Suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek nonfisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya:

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, tamankota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut;
- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

c) Kota Balikpapan sebagai kota yang Berkelanjutan

Suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karenanya, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk memudahhi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan.

Perkembangan kota yang pesatakan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, kedepan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan system ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udarabersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau.

Konsep *Livable City* sesungguhnya merupakan representasi *Sustainable City* yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

d) Madinatul Iman

Mengandung makna sebagai suatu system sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.

Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramalshaleh, berbudaya, taathukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerjakeras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indahaman dan nyaman

Tabel 1.8

Korelasi Isu Strategis dengan Visi

Isu Strategis	Yang akan dicapai pada Tahun 2021	Visi
Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy).	Kota terkemuka	Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman
Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja.		
Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (<i>green city</i>).	Kota Nyaman dihuni dan berkelanjutan	
Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana.		
Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	Madinatul Iman	

Guna mencapai visi, maka ditetapkan pula misi Kota Balikpapan, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan, memperkuat dan memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.

Uraian keterkaitan visi dengan misi serta penjelasan misi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9.

Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

VISI	MISI	PENJELASAN VISI MISI
Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;	Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.
	Mewujudkan kota layak huni	Menetapkan tata kelola untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang

VISI	MISI	PENJELASAN VISI MISI
	yang berwawasan lingkungan;	aman dan nyaman(<i>livable city</i>) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan,fasilitas pendidikan) yang memadai,berkualitas,dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>green city</i>) dengan mengedepankanpengolahan sampah terpadu (<i>zero waste</i>) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dariluaskota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).
	Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;	Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (<i>nonmotorized vehicle</i>) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

VISI	MISI	PENJELASAN VISI MISI
		Peningkatan daya saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjang dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Hasil perumusan tujuan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.10.**Tujuan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021**

NO	MISI	NO	TUJUAN
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing
		2	Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan
		3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan
2	Mewujudkan huni yang lingkungan;kota layak berwawasan	4	Meningkatkan kualitas berwawasan lingkungan
3	Meningkatkan infrastruktur representatif;	5	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur
4	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;	6	Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat
		7	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
5	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.	8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.11.**Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah**

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Pendidikan Non Formal
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini
7	Program Pendidikan Dasar
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
12	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM Serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
13	Program Perencanaan Tata Ruang
14	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
16	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
17	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
18	Program Pengendalian Banjir
19	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
20	Program Pembangunan Pedestrian Kota
21	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH
22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
23	Program Lingkungan Sehat Perumahan
24	Program Pengembangan Perumahan
25	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
26	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran
27	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
28	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
29	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
30	Program Sarana dan Prasarana Logistik
31	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
32	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
33	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
34	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
35	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
36	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
37	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
38	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
39	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
40	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
41	Program Pengendalian Inflasi
42	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH
43	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
44	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
45	Program Penataan Administrasi Kependudukan
46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
47	Program Keluarga Berencana
48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
49	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
50	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
51	Program Keselamatan Pengguna Jalan
52	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
53	Program Penerangan Jalan Umum
54	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
55	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
56	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
57	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
58	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
59	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
60	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
61	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
62	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
63	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
64	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH
65	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
66	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
67	Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
68	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
69	Program Pelestarian Cagar Budaya
70	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
71	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
72	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
73	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
74	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
75	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata
76	Program Pengembangan Kemitraan
77	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
78	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
79	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
80	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
81	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar
82	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
83	Program Penataan Struktur Industri
84	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
85	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
86	Program Pengembangan Data/Informasi
87	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
88	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH
	dan Keuangan
89	Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah
90	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
91	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan
92	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
93	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
94	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir ASN
95	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN
96	Program Penelitian dan Pengembangan
97	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
98	Program Penataan Peraturan Perundangundangan
99	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
100	Program Pengembangan Data dan Informasi
101	Program Pengembangan Ketahanan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya
102	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
103	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
104	Program Pendidikan Politik Masyarakat
105	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan
106	Program Bantuan Hukum dan HAM
107	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah
108	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH
109	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Sekolah
110	Program Hari Jadi Kota
111	Program Keluarga Berencana
112	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
113	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
114	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
115	Program Pelayanan Angkutan Perairan
116	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat
117	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
118	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
119	Program Pembinaan Jasa Konstruksi
120	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
121	Program Pemeliharaan Drainase Saluran
122	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
123	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
124	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
125	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
126	Program Penataan Kelembagaan
127	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
128	Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn)

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH
129	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan
130	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan.
131	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
132	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
133	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
134	Program Pengelolaan Parkir
135	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
136	Program Pengelolaan Rumah Susun
137	Program Pengembangan City Gas
138	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
139	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan/Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
140	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
141	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
142	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
143	Program Peningkatan Produksi Perikanan
144	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
145	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan
146	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan
147	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan
148	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
149	Program Peningkatan Produksi Peternakan
150	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan/Ternak

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH
151	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
152	Program Peningkatan Produksi Pertanian
153	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
154	Program Pengembangan Sistem Pelaporan
155	Program Peningkatan Drainase Lingkungan
156	Program Peningkatan Jalan Lingkungan
157	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
158	Program Peningkatan Kinerja ASN
159	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
160	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
161	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
162	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
163	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
164	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
165	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
166	Program Penyebarluasan Informasi Daerah
167	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana
168	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
169	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
170	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
171	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Sumber data :Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2020

D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai Berikut:

Tabel 1.12.

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Peningkatan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor Penyediaan Jasa Engineering Kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website Disdikbud Pengadaan Meubelair Pengelolaan Website BPKD Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>Listrik dan Air Bangunan Aset Pemerintah</p> <p>Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota</p> <p>Penyediaan Jasa, Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Gedung Kantor</p> <p>Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Lainnya</p> <p>Penyediaan/Sewa Gedung Kantor</p> <p>Penyediaan Rumah Jabatan/ Dinas Camat dan Lurah</p>
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<p>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya</p> <p>Pengadaan mesin/kartu absensi</p> <p>Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</p> <p>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Monitoring Kedisiplinan, Kegiatan Upacara dan Cuti Hari-Hari Besar</p> <p>Monitoring Kedisiplinan Internal dan Eksternal Perangkat Daerah</p>
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<p>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>Bimbingan Teknis Aparatur</p> <p>Pengembangan SDM Aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan perindustrian</p> <p>Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur</p> <p>Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Pembinaan fisik dan mental bagi anggota satuan polisi pamong praja</p>
5	Program Pendidikan Non Formal	<p>Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur</p> <p>Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan</p> <p>Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah</p> <p>Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara</p> <p>Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat</p> <p>Pengelolaan Rumah Pintar</p> <p>Ujian Nasional Program Paket A, B, C dan C Kejuruan</p> <p>Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Lomba Hari Aksara Internasional HAI) Tk Kota Balikpapan
		Apresiasi GTK PAUD Non Formal
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan
		Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD
		Pendamping Tutor PAUD
		Hari Anak Nasional (HAN) Porseni PAUD se Kota Balikpapan
		Penilaian Akreditasi PAUD Dikmas
7	Program Pendidikan Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP
		Pembangunan ruang serba guna/aula SMP
		Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD
		Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP
		Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP
		Pengadaan perlengkapan sekolah SMP
		Pembangunan SD dan SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah
		Olympiade Sains SD
		Olympiade Sains SMP

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD
		Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP
		Pembinaan Gugus SD
		Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP
		Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SD
		Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SMP
		Penambahan ruang kelas baru SD/MI
		Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
		Penilaian Akreditasi SD
		Penilaian Akreditasi SMP
		Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
		Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP
		BOSDA SDN 001 Balikpapan Barat

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		BOSDA SDN 002 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 003 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 004 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 005 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 006 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 007 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 008 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 009 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 010 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 011 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 012 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 013 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 014 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 015 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 016 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 017 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 018 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 019 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 020 Balikpapan Barat
		BOSDA SDN 001 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 002 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 003 Balikpapan Kota

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		BOSDA SDN 004 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 005 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 006 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 007 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 008 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 009 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 010 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 011 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 012 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 013 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 014 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 015 Balikpapan Kota
		BOSDA SDN 001 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 002 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 003 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 004 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 005 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 006 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 007 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 008 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 009 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 010 Balikpapan Selatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		BOSDA SDN 011 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 012 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 013 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 014 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 015 Balikpapan Selatan
		BOSDA SDN 001 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 002 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 003 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 004 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 005 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 006 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 007 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 008 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 009 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 010 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 011 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 012 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 013 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 014 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 015 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 016 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 017 Balikpapan Tengah

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		BOSDA SDN 018 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 019 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 020 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 021 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 022 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 023 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 024 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 025 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 026 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 027 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 028 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 029 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 030 Balikpapan Tengah
		BOSDA SDN 001 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 002 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 003 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 004 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 005 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 006 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 007 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 008 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 009 Balikpapan Timur

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		BOSDA SDN 010 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 011 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 012 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 013 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 014 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 015 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 016 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 017 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 018 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 019 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 020 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 021 Balikpapan Timur
		BOSDA SDN 001 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 002 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 003 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 004 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 005 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 006 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 007 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 008 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 009 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 010 Balikpapan Utara

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		BOSDA SDN 011 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 012 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 013 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 014 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 015 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 016 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 017 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 018 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 019 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 020 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 021 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 022 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 023 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 024 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 025 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 026 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 027 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 028 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 029 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 030 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 031 Balikpapan Utara
		BOSDA SDN 032 Balikpapan Utara

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		BOSDA SDN 033 Balikpapan Utara
		BOSDA SMP Negeri 1 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 2 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 3 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 4 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 5 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 6 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 7 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 8 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 9 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 10 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 11 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 12 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 13 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 14 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 15 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 16 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 17 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 18 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 19 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 20 Balikpapan
		BOSDA SMP Negeri 21 Balikpapan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>BOSDA SMP Negeri 22 Balikpapan</p> <p>BOSDA SMP Negeri 23 Balikpapan</p> <p>Pembangunan Pagar Sekolah Dasar</p> <p>Pembangunan Pagar Sekolah Meneng</p> <p>Pengadaan Meubelair Sekolah SD</p> <p>Pengadaan Meubelair Sekolah SMP</p> <p>Pembangunan Jamban/Toilet Sekola</p> <p>Pembangunan Jamban/Toilet Sekola</p> <p>BOSDA SDN 021 Balikpapan Barat</p> <p>BOSDA SDN 022 Balikpapan Barat</p>
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik</p> <p>Penguatan Tim Penilai Angka Kredit</p> <p>Penguatan pengelolaan Data dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Penanganan Kasus-Kasus Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Pemilihan dan Perhargaan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi</p> <p>Pelatihan karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru/Pendidik</p> <p>Pelatihan dan Lomba Pengembangan model Pembelajaran berbasis TIK</p> <p>Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
		Pelaksanaan Program Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ)
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggian Baru
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Tengah
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari
		Operasional Peningkatan Kesehatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Rongent
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi Kota
		Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
		Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
		Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman Obat Keluarga (TOGA)
		Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen
		Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat
		Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat
		Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
		Pembayaran Klaim Visum
		Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Trafficking di Puskesmas
		Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Penyehatan Lingkungan
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>Sari Ulu</p> <p>Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)</p> <p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</p> <p>Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan</p> <p>Peningkatan Gizi Masyarakat</p> <p>Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA</p> <p>Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana</p> <p>Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Graha Indah</p> <p>Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Graha Indah</p>
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	<p>Peningkatan Imunisasi</p> <p>Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah</p> <p>Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS</p> <p>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC,ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	<p>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus</p> <p>Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak</p> <p>Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu</p>
12	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM Serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	<p>Rehab Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya</p> <p>Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan</p> <p>Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan</p> <p>Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan</p> <p>Pengadaan Obat dan BMHP</p> <p>Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Manajemen Desentralisasi Kesehatan</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas
13	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan Survey dan pemetaan Kegiatan Penyusunan Perda Insentif dan Disinsentif
14	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Balikpapan Pengawasan Bangunan Umum dan Pemanfaatan Tata Ruang Penertiban Bangunan Umum dan Pemanfaatan Tata Ruang Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pembangunan Jaringan Air Bersih Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
16	Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Pembebasan Lahan Teritip (Tahap II) Pembebasan Lahan Aji Raden
17	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Supervisi Pembangunan Jalan dan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Jembatan
		Pembebasan Lahan (pembangunan jalan dan jembatan)
18	Program Pengendalian Banjir	Pembangunan Bendali
		Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
		Perencanaan Pengendalian Banjir
		Supervisi Pengendalian Banjir
		Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir
19	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
		Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
20	Program Pembangunan Pedestrian Kota	Pembangunan Trotoar
		Pemeliharaan Trotoar
		Perencanaan Trotoar
		Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota
21	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan
		Peningkatan Jembatan
		Pemeliharaan JPO
		Perbaikan Simpang Jalan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (POMMS) Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah	Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan Gedung Kantor Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS) Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
23	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh
24	Program Pengembangan Perumahan	Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
25	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
26	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	<p>Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Bencana</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Jungel Rescue dan Vertical Rescue</p> <p>Pendidikan / Pelatihan Water Rescue</p> <p>Pendidikan / Pelatihan Fire Rescue</p> <p>Simulasi Kebakaran dan Evakuasi Gedung Bertingkat</p> <p>Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</p> <p>Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Aparatur Penanggulangan Bencana</p> <p>Pengadaan Early Warning System (EWS)</p> <p>Penyuluhan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran</p> <p>Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Dini</p> <p>Penyediaan Informasi Kinerja berbasis Internet Technology</p>
27	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	<p>Pembentukan Relawan Tanggap Darurat dan Simulasi Penanggulangan Bencana dengan Masyarakat dan Aparatur terkait</p> <p>Bimbingan Teknis Pengembangan SDM</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Manajemen Kedaruratan Bencana (Disaster Emergency Management) Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Petugas Monitoring, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan (PUSDALOPS)
28	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan
29	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pembinaan dan Penguatan Perlindungan Masyarakat Pelatihan LINMAS Fasilitasi Pengamanan PEMILU
30	Program Sarana dan Prasarana Logistik	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Penyusunan DED Gedung Pos Pemadam Pembangunan Kantor/Pos Pemadam Penyediaan Fasilitas Kantor/Pos Pemadam Penanganan Kejadian Bencana dan Kebakaran (Antisipasi) Penyediaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
31	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Stimulan Sarana Prasarana Pasca Bencana Rekonstruksi dan Stimulan Sarana dan Prasarana Bencana

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
32	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Menengah Pertama Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu (PBI) Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
33	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Perlindungan Korban Pembinaan Pendayagunaan Bagi Penyandang Disabilitas Pelayanan Tuna Sosial Pembinaan Lanjut Usia
34	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kepahlawanan, Keperintisan,

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial Fasilitasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Penyebarluasan Informasi Kesejahteraan Sosial
35	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Penyelenggaraan Pemagangan Pembinaan LPK Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
36	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pelayanan Antar Kerja Perluasan Kesempatan Kerja
37	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja Pemasyarakatan Hubungan Industrial
38	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pemberdayaan Keluarga Melalui Peringatan Hari Keluarga Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Pembinaan Ketahanan Keluarga Pendayagunaan Kelompok Kegiatan/IMP

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
39	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pembinaan Penggerakan Partisipasi Remaja
40	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak
41	Program Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi Daerah (PID)
		Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
42	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengadaan Tanah untuk Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota dan Kawasan Pesisir
		Pemeliharaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota
		Pengelolaan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
		Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir
		Pengelolaan Kawasan Lahan Kritis dan Rawan Longsor
		Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan
43	Program Pengendalian	Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Alat Pantau Kualitas Udara Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Emisi Cerobong Sumber Tidak Bergerak Pengelolaan Limbah B3 Pengendalian Pencemaran Air Limbah Pelaksanaan Penilaian Instrumen Pencegahan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Pengembangan Format MRV (pengukuran, pelaporan & verifikasi) Implementasi RAD GRK Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Balikpapan Inventarisasi Sumber Pencemar ke Sungai - Sungai di Kota Balikpapan Pemeliharaan Sumur Pantau Air Bawah Tanah Pembuatan sumur pantau air bawah tanah Evaluasi Penataan Lingkungan (Proper) Pengelolaan Prokasih Pemantauan Kualitas Air Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Air Tanah/Air Permukaan Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Operasi Yustisi Persampahan Pengawasan Penaatan Lingkungan oleh PPLH Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup Sosialisasi Lingkungan Hidup Kampung Iklim Pilot Project Eco Office Penyusunan Dokumen Profil Adipura Kota Balikpapan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
44	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah 3 R Pengolah sampah dengan sanitari landfill Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah TPS dan TPA Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Protokol Kota Balikpapan Pelayanan Retribusi Persampahan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Pembuatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA Manggar Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah Induk Penyusunan Database wajib retribusi sampah Kota Balikpapan Pembangunan TPST Pembangunan MRF Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Persampahan
45	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pemeliharaan dan perbaikan software dan hardware aplikasi SIAK Operasional 3 in 1 (Akta kelahiran, KIA, dan Perubahan Kartu Keluarga) Pengembangan Software dan Hardware Aplikasi SIAK Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumen Kependudukan Pengelolaan dan Penataan Arsip Akta-Akta Catatan Sipil Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Balikpapan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa KKN Pembinaan Posyandu

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
47	Program Keluarga Berencana	Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Kota Balikpapan Penyuluhan dan Penggerakan PUS ber-KB Penjaminan Kualitas Layanan KB Pencatatan, Pelaporan Evaluasi Sistem informasi Keluarga dan Ketahanan Keluarga
48	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang (Depo Kontainer, Kawasan Pergudangan dan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)) Pengadaan Lahan Terminal Type-C Kecamatan Balikpapan Selatan (Jl. Asnawi Arbain)
49	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pembangunan Koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
50	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan sarana lalu lintas jalan (Rambu tidak bersuar) Pengadaan sarana lalu lintas jalan (Rambu bersuar)
51	Program Keselamatan Pengguna Jalan	Penyediaan jalur sepeda Penyediaan zebracross dan pita penghaduh
52	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengadaan unit Pengujian Kendaraan Bermotor Peremajaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Perbaikan gedung dan sarana penunjang UPT. PKB
53	Program Penerangan Jalan Umum	Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Baru Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan Umum (PJU) Pembayaran rekening bulanan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pengadaan dan pemasangan lampu LED Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan
54	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pengembangan dan Pengelolaan e-Government Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Sewa Bandwidth Internet Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Operasional Aplikasi Payment Online Pengembangan aplikasi Pajak daerah Pengembangan Website BPPDRD
55	Program Pengembangan dan Pemberdayaan	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
	Koperasi	
56	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Pembinaan Pengembangan SDM UMKM
57	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Partisipasi Hari Koperasi Nasional, Provinsi dan Kota Balikpapan
58	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Temu Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
59	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyediaan Profil Investasi Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD Pendampingan Bank Pekreditan Rakyat (BPR)
60	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	Pembinaan Penanaman Modal
61	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyelenggaraan Promosi Investasi Koordinasi bidang Perekonomian Daerah se- Kalimantan Timur dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Promosi Daerah
62	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses	Survey Kepuasan Konsumen Bidang Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
	Perizinan	Pemanfaatan Ruang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha
63	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan Dan Investasi Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler
64	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia Peringatan Hari Sumpah pemuda Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Balikpapan Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka Kota Balikpapan Sosialisasi kewirausahaan pemuda Pelatihan kewirausahaan pemuda bidang teknologi, informasi dan industri kreatif Pengembangan media KIE kepemudaan Pelatihan wirausaha muda berwawasan lingkungan Fasilitasi bhakti sosial organisasi pemuda peduli masyarakat Pembinaan Kepemudaan Kota Balikpapan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Pelatihan kader pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda
65	Program Pembinaan dan Pemasyyarakatan Olahraga	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani Peringatan Hari Besar dan Pawai Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga (SIDIA) Penyelenggaraan pertandingan sepakbola Turnamen bulu tangkis kota Balikpapan Monitoring Pertandingan Event-event Olahraga Penyelenggaraan pertandingan sepatu roda Penyelenggaraan kejuaraan tennis Penyelenggaraan kejuaraan basket Penyelenggaraan kejuaraan bola tangan Penyelenggaraan pertandingan bola volley Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Manajemen pembibitan atlet kota Balikpapan Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tradisional Pengembangan dan pembinaan olah raga

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		rekreasi dan masyarakat Penyelenggaraan pertandingan renang Penyelenggaraan pertandingan beladiri Kompertisi olahraga difabel (NPC) Penyelenggaraan Senam Massal Lansia Pendataan olahraga masyarakat Pekan olahraga pelajar SD, SMP, SMA/SMK usia maksimal 17 tahun Mengikuti lomba olahraga tradisional tingkat provinsi Mengikuti even olahraga tingkat nasional Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Festival perahu hias dan lomba senam kesehatan jasmani dalam rangka hari jadi kota Balikpapan
66	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		prasarana olahraga
		Pengembangan sarana olahraga
67	Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya	Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Kota Balikpapan Pembinaan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti Pentas Seni Agama Islam (PAI) Tingkat SD/SMP Lomba Sekolah Sehat (LSS) Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan Pengembangan Olahraga Tradisional di Sekolah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengembangan Seni dan Olahraga di Sekolah Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Olahraga Tradisional

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Pembinaan Seni dan Budaya dan Olahraga Liga Sepak Bola SMP Berkelanjutan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
68	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tabligh Akbar Dalam Rangka HUT Kota Balikpapan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Islam Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Kota Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Timur Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan Balikpapan Tengah Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan Balikpapan Barat Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan Balikpapan Utara
		Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Selatan
69	Program Pelestarian Cagar Budaya	Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya
		Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan
		Promosi dan Pengembangan Cagar Budaya dan Museum
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cagar Budaya dan Museum
		Lawatan Sejarah Cagar Budaya dan Museum
		Sosialisasi Perundang Undangan tentang Cagar Budaya
		Pembuatan Brosur Informasi tentang Cagar Budaya dan Permuseuman
70	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Membaca
		Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
		Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Peningkatan Layanan Perpustakaan Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan Pengelolaan Information Technology (IT) Perpustakaan Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan
71	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengumpulan Data Arsip Statis Penyusunan Sistem Katalog Data
72	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika
73	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB) Cetak Brosur Informasi dan Souvenir Pemutakhiran Website Pariwisata dan Operasional TIC Bandara Sepinggan Operasional Duta Wisata Pengembangan Informasi Pariwisata berbasis Digital / Aplikasi Pengembangan Sadar wisata dan Sapta Pesona

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
74	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
75	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	<p>Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Kunjungan Obyek Wisata di Balikpapan</p> <p>Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan</p> <p>Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari</p> <p>Pengumpulan data usaha pariwisata</p> <p>Operasional Tim Pemeriksa Lapangan untuk Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata</p> <p>Pengamanan Hari Libur/Besar Nasional di Kawasan Pantai Manggar Segara Sari</p>
76	Program Pengembangan Kemitraan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
77	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	<p>Pengembangan Produk dalam negeri, perijinan usaha dan kemitraan perdagangan</p> <p>Peningkatan kelancaran distribusi dan informasi harga barang pokok strategis serta partisipasi pasar lelang</p>
78	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	<p>Peningkatan pengawasan barang perdagangan</p> <p>Operasional Kemetrolgian</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan sarana Kemetrolgian</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
79	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Pandansari Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Pandansari (ex Kebakaran) Perbaiki rumah kompos/daur ulang sampah
80	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar
81	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban dan Kebersihan Pasar Penanganan sampah penunjang Kebersihan Pasar
82	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri Pengembangan Misi dagang, Kontrak Dagang, Promosi dan Pameran dalam dan luar
83	Program Penataan Struktur Industri	Pembangunan dan pengembangan sentra Industri kecil sumber (SIKS) Operasional UPT SIKS Operasional UPT SIKT Peningkatan kelembagaan sentra-sentra industri potensial Kota Balikpapan peningkatan produktivitas dan alih teknologi Fasilitasi mesin produksi pelaku usaha di sentra-sentra potensial

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Pembangunan dan pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT)
		Peningkatan dan pengembanagn teknologi dan Industri logam, mesin, alat dan elektronika
84	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan kualitas aparat di SIKS Pelatihan Diversifikasi Hasil perikanan Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Hak Cipta, dan Label Halal Sosialisasi Peningkatan Standart Mutu Produk Pelatihan Aneka usaha IKM Pengembangan dan Pembinaan Industri Kreatif Penyertaan promosi dan partisipasi industri kecil menengah (Dekranasda) Pengawasan Pengendalian TDI & IUI
85	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Pengawasan atas penerapan sistem standar nasional indonesia (SNI) Pemutakhiran Teknologi Kota Balikpapan Penguatan / pertumbuhan kewirausahaan bagi sekolah kejuruan di Kota Balikpapan Pelatihan Sistem Industri Tahu dan Tempe
86	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan Basis Data Kewilayahan Penyusunan Profil Kecamatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
87	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah
		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah
		Rapat - rapat Koordinasi kerja bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian
		Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
		Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Barat
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ilir
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Tengah
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ulu
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kariangau
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Margo Mulyo
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Marga Sari
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Balikpapan Tengah
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ulu
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ilir
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Kota
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Prapatan
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Telaga Sari
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Klandasan Ulu
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Klandasan Ilir
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Utara

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Batu Ampar
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Joang
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Muararapak
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsamarinda Baru
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Graha Indah
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Selatan
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepingga
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungbahagia
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepingga Baru
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepingga Raya
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sungainangka
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Baru
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Bahagia
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Balikpapan Timur Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Lamaru Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Teritip Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Baru
88	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah kota Balikpapan Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan 30 BLUD Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
89	Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah	Pengaman Aset Pemerintah Kota Balikpapan Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
90	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyusunan dan Koordinasi Data Pendapatan
91	Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan
92	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Akuntan Publik
		Pengelolaan Gedung Kantor
		Peningkatan Pengelolaan Gaji PNS dan Administrasi Perbendaharaan
		Peningkatan Administrasi Kas Daerah
		Sosialisasi penatausahaan Keuangan Daerah
		Penyusunan analisa standar belanja
		Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal Tentang Penjabaran APBD
		Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal Tentang Perubahan Penjabaran APBD
		Pengelolaan Administrasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah
		Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD dan RKA SKPD
		Penyusunan Regulasi-Regulasi Pengelolaan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Keuangan dan Aset Daerah
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA
		Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2
		Pengumpulan Data Penghapusan piutang Pajak Daerah
		Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB
		Operasional SIMPATDA Pajak Daerah
		Updating Data PBB-P2
		Operasional Pelayanan Pajak Daerah
		Operasi Sisir dan Pengawan Objek Pajak Daerah
		Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak daerah
		Sosialisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan
		Pengembangan Potensi Pajak daerah
		Pengendalian Operasional Pajak daerah
		Pendampingan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah
		Kajian Potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan
		Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemanfaatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>Aset dan Pendapatan Daerah</p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah</p> <p>Pemeliharaan Rutin Berkala Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan</p> <p>Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan</p> <p>Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi</p> <p>Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan</p>
93	<p>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p>	<p>Pelayanan Klinik APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Evaluasi pengawalan dan pengamanan program kegiatan pemerintah daerah APH</p> <p>Monitoring dan pemantauan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi (Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi</p> <p>Penelitian dan Penilaian LP2P PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reviu RKA Perangkat Daerah-RKA</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>PPKD dan Reviu RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Pemantauan, Penyusunan dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan Internal dan External di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pengembangan sistem Pemantauan TLHP</p> <p>Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Investigasi/RIKTU/Pengaduan Masyarakat Di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Evaluasi SAKIP OPD dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Pelaksanaan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan</p> <p>Pelaksanaan Saber Pungli di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan</p>
94	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir ASN	<p>Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Penyusunan Formasi PNS Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pendidikan PNS melalui Tugas Belajar Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Pemetaan Kompetensi PNS Pembinaan Jabatan Fungsional Penyelesaian Kenaikan Pangkat Proses Data Mutasi Penyusunan Analisis kebutuhan diklat dan evaluasi pasca diklat
95	Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN	Pembinaan Kepegawaian Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri dan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Operasional KORPRI Kota Balikpapan Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin ASN
96	Program Penelitian dan Pengembangan	Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan
97	Program Peningkatan	Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
	Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kegiatan Reses Rapat-rapat Paripurna Rapat Kerja Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah Kota Balikpapan Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Kajian-Kajian Peningkatan Kompetensi Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD (Adeksi) Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan dan Fraksi Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Politik dan Hukum Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata dan Ketahanan Pangan Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pendidikan dan Kesehatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan (Bimtek)
98	Program Penataan Peraturan Perundangundangan	Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum
		Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Balikpapan
		Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah
		Pengarsipan Hukum Online
99	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
		Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan
		Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
		Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
		Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
		Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara
		Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>kemasyarakatan (RT)</p> <p>Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat</p> <p>Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat</p> <p>Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL)</p> <p>Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Umum</p> <p>Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pengurus Rukun Tetangga</p> <p>Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal</p>
100	Program Pengembangan Data dan Informasi	<p>Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>Penyusunan Profil Daerah</p> <p>Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pengelolaan Data Pembangunan</p> <p>Penyusunan Profil Kecamatan</p> <p>Pengelolaan Data dan Perencanaan</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Ketenagakerjaan
101	Program Pengembangan Ketahanan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>Deteksi Dini Terhadap Potensi Gejala/Peristiwa, Ancaman,Tantangan,Hambatan dan Gangguan</p> <p>Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial</p> <p>Monitoring,Evaluasi dan Pemantauan Orang Asing (NGO)</p>
102	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<p>Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI</p> <p>Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat</p> <p>Pengelolaan Data Sarana Rumah Ibadah dan Pondok Pesantren</p>
103	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	<p>Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</p> <p>Monitoring Kondusifitas Kota</p>
104	Program Pendidikan Politik Masyarakat	<p>Pengelolaan Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan kepada partai Politik</p> <p>Pengelolaan Berkas Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan</p> <p>Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Daerah</p> <p>Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Ormas, Partai Politik, dan Pemilu</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Desk Pemilu/Pemilukada
105	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan	Rakor, Orientasi dan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan
106	Program Bantuan Hukum dan HAM	Proses Penyelesaian Perkara dan Pemberian Bantuan Hukum Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan
107	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan
108	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	Operasional, Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota
109	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
110	Program Hari Jadi Kota	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota
111	Program Keluarga Berencana	Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan Kerjasama Terhadap FPK,FKUB,dan PPWK,KOMINDA,FKDM Kota Balikpapan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</p> <p>Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Nasional</p>
112	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<p>Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>Pembinaan dan Kerjasama Terhadap FPK,FKUB,dan PPWK,KOMINDA,FKDM Kota Balikpapan</p> <p>Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</p> <p>Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Nasional</p>
113	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	<p>Perlindungan Anak</p> <p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak</p> <p>Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penguatan Sistem Perlindungan Anak</p> <p>Operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak</p> <p>Perlindungan Perempuan</p> <p>Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Perlindungan Perempuan</p>
114	Program Layanan Pengadaan Barang dan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
	Jasa	Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan
115	Program Pelayanan Angkutan Perairan	Operasional dan pemeliharaan kapal patroli Penyuluhan keselamatan pelayaran
116	Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi berbasis TIK Pengelolaan Informasi dan dokumentasi Monitoring isu publik
117	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	Dukungan Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Pekan Nasional (PENAS) KTNA
118	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan kualitas/mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan
119	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Pembinaan Jasa Konstruksi
120	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
121	Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase (POMMS) Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase Supervisi Pemeliharaan Saluran dan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Drainase
		Operasional Pemeliharaan Saluran (UPT)
122	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi PPNS Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Penyelidikan, Penyidikan dan Penegakan Produk Hukum Daerah Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait selama perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru Koordinasi Operasi Penertiban dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka Pemilihan Umum

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
123	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
124	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pemeliharaan Terminal Type-C Pemeliharaan Halte Angkutan Umum Penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
125	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penataan Administrasi Wilayah
126	Program Penataan Kelembagaan	Evaluasi Ketatalaksanaan
127	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pengadaan Tanah RSKB Sayang Ibu Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara Entri Data Sistem Informasi Pertanahan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan
128	Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)
129	Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Jalan Letjen Suprpto
130	Program Pengawasan dan Pengendalian	Operasi pemeriksaan lalu lintas (Razia) dan pengawasan, pengendalian, monitoring dan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
	Angkutan Jalan.	<p>pelaporan Lalu Lintas Angkutan dan Jalan</p> <p>Pemeliharaan timbangan portable</p> <p>Sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus</p> <p>Pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan dan Jalan</p> <p>Sosialisasi ketertiban dan keselamatan angkutan orang</p>
131	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	<p>Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional</p> <p>Posko Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan</p> <p>Forum Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ)</p>
132	Program Pengelolaan Areal Permakaman	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman
133	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	<p>Pengelolaan Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Kota Balikpapan</p> <p>Pengadaan Natura Pondok Pesantren</p> <p>Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan</p>
134	Program Pengelolaan Parkir	Pengelolaan parkir Kota Balikpapan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
135	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Taman Kota Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias / Peneduh
136	Program Pengelolaan Rumah Susun	Operasional Infrastruktur Rumah Susun Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun
137	Pengembangan City Gas	Survey Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga Koordinasi Pengembangan conveter kit pada kendaraan bermotor
138	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan Irigasi
139	Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum dan Sistem Informasi Terpadu Penyusunan Kajian Lintas Harian Rata-rata Penyusunan Manajemen Rekayasa dan Modeling Lalu Lintas Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Balikpapan Penyusunan profile, updatting website dan informasi komunikasi Lalu Lintas Angkutan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		dan Jalan
		Kajian alur pelayaran sungai-sungai di Kota Balikpapan
140	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
141	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Diseminasi Informasi Daerah
		Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa
		Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa
		Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan
142	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa
		Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan
143	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Pengembangan/Peningkatan/Pengelolaan dan Operasional Balai Benih Ikan (BBI)
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Air Tawar
		Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Fasilitas Pelayanan BBI Teritip Balikpapan
144	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Operasional Tempat Pendaratan Ikan/TPI

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
145	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan	Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan
146	Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan	Penanganan Pelayanan Pencatatan Usaha Perikanan
147	Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
		Penilaian Pokdakan, KUB, dan Poklahsar Perikanan
		Pemberdayaan Kelembagaan Perkebunan
		Pembinaan Teknis, Pengolahan dan Penganekaragaman Pakan Ternak
148	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Intensifikasi Tanaman Perkebunan
		Pengendalian OPT Gangguan Usaha Perkebunan
		Pelatihan Budidaya Perkebunan
149	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Operasional Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)
150	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan / Ternak	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Hewan dan Ternak
		Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
151	Program Peningkatan	Peningkatan Sarana Prasarana dan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
	Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Operasional Laboratorium Kesmavet Pengawasan Keamanan Peredaran Produk Peternakan Peningkatan Sarana Prasarana RPH
152	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Operasional Unit Pembibitan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura Pemanfaatan Lahan Pekarangan
153	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal Analisa Data Pangan Pengembangan Persediaan Pangan dan Distribusi Pangan Pengawasan Keamanan Pangan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
154	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	Pengendalian Kegiatan APBD Operasional Tim SIMONTEPRA Kota Balikpapan Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
155	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Peningkatan Drainase Lingkungan Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan
156	Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah
157	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Pelaksanaan Raker APEKSI Komwil V
158	Program Peningkatan Kinerja ASN	Evaluasi Kinerja PNS
159	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Dokumen Fisik PNS/CPNS Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Penerbitan Buku Profil, Buku Saku, Brosur Kepegawaian dan Buku Kumpulan Peraturan Kepegawaian
160	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
161	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir Peningkatan Pelayanan Kesehatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
	Masyarakat	Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Bahagia Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD UPT Laboratorium Dan Radiologi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Muara Rapak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ilir Peningkatan Pelayanan Kesehatan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Masyarakat Puskesmas BLUD Teritip Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Batu Ampar Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Damai Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Samarinda Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Rejo Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pelayanan BLUD Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
162	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pembinaan Pelayanan Publik Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
163	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Peran PKK melalui Fungsi Kesekretariatan TP PKK Kota Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja I Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja II Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja III

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja IV
		Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Ilir
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Tengah
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Ulu
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Kariangau
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Margo Mulyo
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Marga Sari
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Barat
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Kelurahan Baru Tengah
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ulu
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margo Mulyo
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Marga Sari
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ulu
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ilir
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Prapatan
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Telaga Sari
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan Ulu
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan Ilir
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Kota
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kelurahan Damai
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Batu Ampar
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsamarinda
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Joang
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Muararapak
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsamarinda Baru
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Graha Indah
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Utara
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda</p> <p>Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak</p> <p>Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda Baru</p> <p>Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah</p> <p>Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan</p> <p>Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungbahagia</p> <p>Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Baru</p> <p>Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Raya</p> <p>Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sungainangka</p> <p>Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Baru</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Bahagia
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Selatan
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepingga
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungbahagia
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepingga Baru
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepingga Baru
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepingga Raya
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka
		Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungbahagia
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Baru
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Raya
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sungainangka
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Baru
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Bahagia
		Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Timur
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Lamaru
		Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		<p>Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Teritip</p> <p>Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar Baru</p> <p>Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar</p> <p>Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru</p> <p>Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru</p>
164	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	<p>Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)</p> <p>Pengusulan DUPAK dan Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/ Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kota Balikpapan</p> <p>Peningkatan Kapabilitas APIP</p>
165	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	<p>Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum</p> <p>Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum</p> <p>Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum</p> <p>Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum</p>

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
166	Program Penyebarluasan Informasi Daerah	Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah Informasi Publik Pimpinan Visualisasi informasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dokumentasi dan Pengolahan Data Pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Pembaharuan Data Website dan mail balikpapan.go.id Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa Pengelolaan Data dan Informasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan
167	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Sarana prasarana perekonomian daerah
168	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur Fasilitasi Forum CSR Pengendalian Sustainable Development Goals (SDGs) Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
		Kajian Kelayakan Rencana Lokasi Kantor Kelurahan
169	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
170	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
		Pelayanan Korban Bencana
171	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Rambu Tidak Bersuar)
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Rambu Bersuar)

Sumber data: Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2020

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di kota Balikpapan telah sesuai dengan Permendagri No.100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana hal tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan ditahun 2020.

Adapun Penerapan Standar Pelayanan Minimal kota Balikpapan yang telah di tuangkan dalam kebijakan RPJMD dan RKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13

Penerapan SPM kota Balikpapan Pada Tahun 2020

NO	Uraian SPM	Kebijakan dalam RPJMD	Kebijakan dalam RKPD	Keterangan
1	Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pendidikan Dasar	Program Pendidikan Dasar	
2	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	

NO	Uraian SPM	Kebijakan dalam RPJMD	Kebijakan dalam RKPD	Keterangan
		Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan	

NO	Uraian SPM	Kebijakan dalam RPJMD	Kebijakan dalam RKPD	Keterangan
		Permukiman	Permukiman	
5	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Tanggap Darurat penanggulangan Bencana	Program Tanggap Darurat penanggulangan Bencana	
		Program Sarana dan Prasarana Logistik	Program Sarana dan Prasarana Logistik	
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	

NO	Uraian SPM	Kebijakan dalam RPJMD	Kebijakan dalam RKPD	Keterangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	
6	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	

Sumber data::Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2020



**BAB II - CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,11	80,01	-0,12%
2	Angka Kemiskinan	2,42	2,57	6,20%
3	Angka Pengangguran	7,29	9,00	23,46%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,78%	1,8-2,3%	-
5	Pendapatan Per kapita	156,28 juta rupiah	-	-
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	-	-

Sumber Data : Bappeda Kota Balikpapan, 2020

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Capaian kinerja urusan pemerintahan ada 3 indikator yaitu, Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil, dan Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Berdasarkan indikator kinerja kunci output, maka tingkat pencapaian kinerja, yang meliputi 32 urusan dan 502 ikk dapat dilihat pada lampiran output (terlampir).

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Berdasarkan indikator kinerja kunci hasil, maka tingkat pencapaian kinerja, yang meliputi 32 urusan dan 105 ikk dapat dilihat pada lampiran outcome (terlampir).

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan

Berdasarkan indikator kinerja kunci output, maka tingkat pencapaian kinerja fungsi penunjang, yang meliputi 4 urusan dan 16 ikk dapat dilihat pada lampiran output (terlampir).

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Saat ini Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sudah terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Ringkasan Akuntabilitas Kinerja Kota Balikpapan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

				Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Sampai Dengan Tahun 2020			Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020		Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja		Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya		Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai		Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline IKURPJM D	Target Akhir IKURPJM D Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2019	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi		Capaian Kinerja (N)		Capaian Kinerja (N-1)		Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun 2020		Capaian Analisis Efisiensi Tahun 2020		Tingkat Korelasi Prog/Keg Terhadap Kinerja	
							2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.43	10.53	10.49	10.51	10.67	10,68	101,72%	101,62%	100,66%	100,09%	101,91%	101,81%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.73	15.73	14.73	14.93	14.13	14,14	95,93%	94,71%	94,64%	100,07%	101,44%	95,99%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73.95	74.04	73.99	74.00	74.41	74,49	100,57%	100,66%	100,55%	100,11%	100,59%	100,68%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5.95	4.55	5.05	4.85	7.29	9,00	144,36%	185,57%	80,37%	123,46%	137,55%	178,22%	N/A	N/A	77,00%	100,00%
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	62.50	64.92	64.09	64.50	64.66	62,90	100,89%	97,52%	99,87%	97,28%	101,54%	98,14%	N/A	N/A	100,00%	98,00%
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	78.18	79.53	79.13	79.53	80.11	80,01	101,24%	100,60%	99,99%	99,88%	101,75%	101,11%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
7	Tingkat Kemiskinan (TKM)	Persen	2.35	2.30	2.32	2.31	2.42	2,57	104,31%	111,26%	92,06%	106,20%	103,86	110,78%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Indeks	90.10	92.00	92.00	92.00	89.71	89,65	97,51%	97,45%	99,97%	99,93%	97,51%	97,45%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks	58.58	60.64	59.82	60.14	60.42	63,52	101,00%	105,62%	100,92%	105,13%	101,55%	106,19%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
10	Livable City Index (LCI)	Angka Indeks	71.12	74,350.00	73.50	74.00	77.58	81,69	105,55%	110,39%	94,78	105,30%		111,14%	N/A	N/A	96,00%	100,00%

				Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun Sampai Dengan Tahun 2020			Realisasi Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020		Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja		Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya		Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah		Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai		Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline IKURPJM D	Target Akhir IKURPJM D Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2019	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi		Capaian Kinerja (N)		Capaian Kinerja (N-1)		Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun 2020		Capaian Analisis Efisiensi Tahun 2020		Tingkat Korelasi Prog/ Keg Terhadap Kinerja	
							2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	Angka Indeks	73.40	79.00	77.00	78.00	77.75	82,03	100.97%	105,17%	95.51%	105,50%	106,27%	106,53%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
12	Indeks Gini Ratio (GR)	Angka Indeks	0.34	0.30	0.32	0.31	0.32	0,33	100.00%	106,45%	106,45%	103,13%	102,30%	103,13%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
13	PDRB perkapita	Rp. (Juta)	120.32	126.64	122.70	124.63	151.73	155,977 1148	123.66%	125,15%	105,79%	102,80%	124,59%	127,12%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
14	PDRB non Migas	Rp. (Triliun)	33.39	38.62	36.40	37.48	40.61	N/A	111.57%	0,00%	102,74%	0,00%	114.81%	0,00%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
15	Opini laporan keuangan (OLK)	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00%	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
16	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Nilai Kriteria	6.62	6.90	6.75	6.80	6.89	6,92	102.07%	101,76%	99,55%	100,44%	102,84%	102,52%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
17	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	79.36	80.36	79.96	80.16	81.65	80,37	102.11%	100,26%	103,38%	98,43%	102,37%	100,51%	N/A	N/A	99,00%	99,00%
18	Nilai Evaluasi LAKIP	Predikat	55.19	75.00	73.00	74.00	68.68	N/A	94.08%	0,00%	98,05%	0,00%	96,73%	0,00%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
19	Penilaian Kepatuhan	Angka Indeks	50.00	79.00	70.00	75.00	83.19	83,19	118.84%	110,92%	92,86%	100,00%	127,98%	118,84%	N/A	N/A	100,00%	100,00%
20	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Angka Indeks	82.00	87.00	85.00	86.00	89.38	93,30	105.15%	108,49%	59,41%	104,39%	106.405	109,76%	N/A	N/A	100,00%	100,00%



**BAB III - CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN**



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pada Tahun 2020 tidak ada tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Balikpapan.

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pada Tahun 2020 tidak ada tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Balikpapan.



**BAB IV - PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**



BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang terkait. Adapun Penerapan dan Pencapaian SPM di Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar Target Pencapaian dan Realisasi

OPD : Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian		
Pendidikan Dasar				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/Mts)		Disdik belum memberikan data valid	Disdik belum memberikan data valid	Disdik belum memberikan data valid
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Buku Teks Pelajaran	1,155,647	86,235	1,241,882
1.2	Perlengkapan Belajar	144,139	5,111	149,250
1.3	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	298	6	304
1.4	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	724	323	1,047
1.5	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3,032	131	3,163

No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.6	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	285	19	304
1.7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Rp 74,242,425,888	Rp -	Rp 74,242,425,888
1.8	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV	3259	556	3,815
Pendidikan Kesetaraan				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan		Disdik belum memberikan data valid	Disdik belum memberikan data valid	Disdik belum memberikan data valid
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Modul Belajar	17,056	0	17,056
1.2	Perlengkapan Belajar	624	762	1,386
1.3	jumlah rombongan belajar di PKBM	109	6	115
1.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Rp 2,539,780,000	Rp -	Rp 2,539,780,000
1.5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	16	1	17
1.6	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	16	1	17
1.7	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	21	5	26
1.8	PKBM Terakreditasi minimal C	9	8	17
Pendidikan PAUD				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD		Disdik belum memberikan data valid	Disdik belum memberikan data valid	Disdik belum memberikan data valid
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Buku Gambar	17,056	0	17,056

1.2	Alat Mewarnai	624	762	1,386
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.3	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	109	6	115
1.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Rp 2,539,780,000		Rp 2,539,780,000
1.5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	16	1	17
1.6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	16	1	17
1.7	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	21	5	26

4.1.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran

OPD : Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 7,047,611,500.00	Rp 6,180,128,813.00
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dan Mengajar Tk Negeri Pembina I Balikpapan	Rp 140,241,000.00	Rp 130,803,713.00
	Penguatan Dan Peningkatan Mutu Lembaga Paud	Rp 120,237,500.00	Rp 100,104,500.00
	Pendamping Tutor Paud	Rp 6,501,330,000.00	Rp 5,665,461,400.00
I	Hari Anak Nasional (Han) Porseni Paud Se Kota Balikpapan	Rp 0	Rp 0
	Penilaian Akreditasi Paud Dikmas	Rp 60,000,000.00	Rp 57,956,200.00
	Bantuan Operasional Paud Tk Negeri Pembina I Balikpapan (Dak 2019)	Rp 0	Rp 0
	Pembangunan Prasarana Belajar Paud/Tk Negeri (Dak 2020)	Rp 63,600,000.00	Rp 63,600,000.00
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Paud/Tk Negeri (Dak 2019)	Rp 162,203,000.00	Rp 162,203,000.00
II	Program Pendidikan Non Formal	Rp 17,515,320,200.00	Rp 16,181,258,774.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
	Kegiatan Belajar Dan Mengajar Skb Kecamatan Balikpapan Timur	Rp 658,537,000.00	Rp 584,590,459.00
	Kegiatan Belajar Dan Mengajar Skb Kecamatan Balikpapan Selatan	Rp 587,974,200.00	Rp 568,320,953.00
	Kegiatan Belajar Dan Mengajar Skb Kecamatan Balikpapan Tengah	Rp 592,251,000.00	Rp 574,901,765.00
	Kegiatan Belajar Dan Mengajar Skb Kecamatan Balikpapan Utara	Rp 518,184,000.00	Rp 480,431,664.00
	Kegiatan Belajar Dan Mengajar Skb Kecamatan Balikpapan Barat	Rp 319,653,000.00	Rp 246,364,376.00
	Pengelolaan Rumah Pintar	Rp 347,892,000.00	Rp 190,432,739.00
	Ujian Nasioanl Program Paket A, B, C Dan C Kejuruan	Rp 31,550,000.00	Rp 28,882,000.00
	Pengelolaan Insentif Ustadz Dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (Tpa)	Rp 8,213,040,000.00	Rp 8,047,252,500.00
	Lomba Hari Aksara Internasional Hai) Tk Kota Balikpapan	Rp 0	Rp 0
	Apresiasi Gtk Paud Non Formal	Rp 0	Rp 0
	Pengadaan Sarana Belajar Skb (Dak 2019)	Rp 2,000,000,000.00	Rp 1,741,824,996.00
	Pembangunan Prasarana Belajar Skb (Dak 2019)	Rp 1,580,200,000.00	Rp 1,580,199,500.00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dak 2019)	Rp 0	Rp 0
	Rehabilitasi Prasarana Belajar Skb (Dak 2019)	Rp 313,039,000.00	Rp 313,039,000.00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Skb Kecamatan Balikpapan Timur (Dak 2019)	Rp 606,800,000.00	Rp 441,559,300.00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Skb Kecamatan Balikpapan Selatan (Dak 2019)	Rp 499,700,000.00	Rp 404,722,035.00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Skb Kecamatan Balikpapan Tengah (Dak 2019)	Rp 479,600,000.00	Rp 367,834,780.00
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp 323,200,000.00	Rp 266,512,207.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
	Skb Kecamatan Balikpapan Utara (Dak 2019)		
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Skb Kecamatan Balikpapan Barat (Dak 2019)	Rp 443,700,000.00	Rp 344,390,500.00
	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 709,254,000.00	Rp 439,017,581.00
III	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Rp 8,005,000.00	Rp 7,361,750.00
	Penguatan Tim Penilai Angka Kredit	Rp 0	Rp 0
	Penguatan Pengelolaan Data Dan Analisis Kebutuhan Guru Dan Tenaga Kependidikan	Rp 7,440,000.00	Rp 6,703,400.00
	Penanganan Kasus-Kasus Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 11,809,000.00	Rp 11,329,050.00
	Pemilihan Dan Perhargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Berprestasi	Rp 121,000,000.00	Rp 46,333,700.00
	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (Kti) Bagi Guru/Pendidik	Rp 0	Rp 0
	Pelatihan Dan Lomba Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Tik	Rp 121,000,000.00	Rp 108,672,368.00
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Rp 100,000,000.00	Rp 72,899,600.00
	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Rp 0	Rp 0
	Pelaksanaan Program Profesi Guru Dalam Jabatan (Ppgdj)	Rp 340,000,000.00	Rp 185,717,713.00
IV	Program Pendidikan Dasar	Rp 117,299,741,347.00	Rp 110,172,209,938.60
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Sd	Rp 22,000,000.00	Rp 21,473,800.00
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Smp	Rp 49,224,545.00	Rp 48,477,110.00
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Smp	Rp 45,415,260.00	Rp 44,605,770.00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sd	Rp 13,000,000.00	Rp 12,655,100.00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Smp	Rp 195,000,000.00	Rp 192,384,076.00
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Smp	Rp 40,597,060.00	Rp 39,849,920.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Smp	Rp 8,100,000.00	Rp 3,471,820.00
	Pembangunan Sd Dan Smp Terpadu Kelurahan Graha Indah	Rp 420,615,790.00	Rp 337,263,135.00
	Olympiade Sains Sd	Rp 77,889,300.00	Rp 75,423,700.00
	Olympiade Sains Smp	Rp 0	Rp 0
	Pembinaan Dan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang Sd	Rp 136,156,500.00	Rp 125,999,500.00
	Pembinaan Dan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang Smp	Rp 90,825,000.00	Rp 71,396,038.00
	Pembinaan Gugus Sd	Rp 84,975,000.00	Rp 83,626,691.00
	Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat Sd	Rp 27,000,000.00	Rp 26,208,400.00
	Pembinaan, Pengelolaan Dan Pelayanan Manajemen Dan Data Sd	Rp 122,225,000.00	Rp 58,803,018.00
	Pembinaan, Pengelolaan Dan Pelayanan Manajemen Dan Data Smp	Rp 105,153,981.00	Rp 53,929,981.00
	Penambahan Ruang Kelas Baru Sd/Mi	Rp 2,845,570,000.00	Rp 2,120,675,778.60
	Penambahan Ruang Kelas Baru Smp/Mts/Smplb	Rp 5,514,316,000.00	Rp 4,385,687,806.92
	Penilaian Akreditasi Sd	Rp 116,362,500.00	Rp 21,152,350.00
	Penilaian Akreditasi Smp	Rp 6,867,500.00	Rp 6,298,125.00
	Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah Dan Ujian Nasional	Rp 529,552,223.00	Rp 521,415,091.00
	Pra Ujian Sekolah Sd Dan Ujian Sekolah Sd Kota Balikpapan	Rp 446,350,800.00	Rp 440,417,628.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Sd	Rp 2,000,000,000.00	Rp 1,986,980,782.25
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Smp	Rp 2,425,000,000.00	Rp 2,403,099,603.00
	Bosda Sdn	Rp 56,702,121,273.00	Rp 53,490,223,317.00
	Bosda Smp Negeri	Rp 17,540,304,615.00	Rp 16,260,697,921.00
	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (Sd)	Rp 1,954,000,000.00	Rp 1,940,098,681.97
	Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (Smp)	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,477,880,397.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
	Pengadaan Meubelair Sekolah Sd	Rp 4,548,600,000.00	Rp 4,278,394,900.00
	Pengadaan Meubelair Sekolah Smp	Rp 3,500,000,000.00	Rp 3,445,210,790.00
	Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (Sd)	Rp 968,000,000.00	Rp 953,658,241.86
	Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Menengah Pertama (Smp)	Rp 1,250,000,000.00	Rp 1,237,669,991.00
	Pembangunan Prasarana Belajar Smp (Dak 2019)	Rp 3,806,945,000.00	Rp 3,806,905,000.00
	Pengadaan Sarana Belajar Smp (Dak 2019)	Rp 560,000,000.00	Rp 556,601,475.00
	Rehabilitasi Prasarana Belajar Smp (Dak 2019)	Rp 3,643,990,000.00	Rp 3,643,990,000.00
	Rehabilitasi Prasarana Belajar Sd (Dak 2019)	Rp 3,433,600,000.00	Rp 3,433,600,000.00
	Pembangunan Prasarana Belajar Sd (Dak 2019)	Rp 1,569,984,000.00	Rp 1,565,984,000.00
	Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) Pendidikan Dasar	Rp 0	Rp 0
V	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Rp 500,775,000.00	Rp 417,867,500.00
	Pelaksanaan Ppdb Online	Rp 450,000,000.00	Rp 368,142,000.00
	Peringatan Hardiknas	Rp 0	Rp 0
	Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	Rp 0	Rp 0
	Pelaksanaan Adiwiyata Award	Rp 0	Rp 0
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Bos Dan Bop	Rp 47,875,000.00	Rp 46,827,500.00
	Penyusunan Spm Dan Profil Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Rp 2,900,000.00	Rp 2,898,000.00
VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2,567,707,530.00	Rp 2,130,390,730.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 461,872,540.00	Rp 263,427,546.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 42,200,000.00	Rp 15,571,740.00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 563,250,000.00	Rp 553,310,941.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 100,000,000.00	Rp 98,434,600.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 80,000,000.00	Rp 73,508,050.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 40,000,000.00	Rp 39,569,750.00
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 30,000,000.00	Rp 25,920,000.00
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp 275,550,000.00	Rp 259,515,000.00
	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah	Rp 275,206,890.00	Rp 206,300,200.00
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 699,628,100.00	Rp 594,832,903.00
VII	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 986,102,000.00	Rp 693,267,959.00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 35,178,000.00	Rp 35,143,900.00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 0	Rp 0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 280,000,000.00	Rp 198,753,973.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 380,924,000.00	Rp 197,981,473.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 170,000,000.00	Rp 154,216,713.00
	Pemeliharaan Jaringan Internet Dan Website Disdikbud	Rp 120,000,000.00	Rp 107,171,900.00
VIII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 0	Rp 0
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Rp 0	Rp 0
IX	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Rp 9,075,000.00	Rp 9,075,000.00
	Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rohani	Rp 9,075,000.00	Rp 9,075,000.00

4.1.3 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.3
Permasalahan Dan Solusi

OPD : Dinas Pendidikan

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-lain
1	Pengelolaan PAUD	Data riil berbeda dengan yang terdapat pada Data Dapodik	Masih Banyak Guru yang berpendidikan SLTA atau sederajat	Harus sinkron dengan data Dapodik	Minimnya tenaga operator yang mengerti IT	Masih belum semua lembaga melaporkan	
2	Pengelolaan Pendidikan SD	Permasalahan dapat diminimalisasi dengan aplikasi Mandat Bidang PSD SIP dan SERASI	Permasalahan dapat diminimalisasi dengan aplikasi Mandat Bidang PSD SIP dan SERASI	Permasalahan diatasi dengan monitoring dan evaluasi manajemen BOS	Permasalahan diatasi dengan monitoring dan evaluasi manajemen BOS	Permasalahan diatasi dengan monitoring manajemen BOS	Masih kekurangan pengelola keuangan di sekolah . Mengingat nonPNS, sering resign sehingga pengelola baru harus dilatih lagi oleh sekolah atau Dinas.
3	Pengelolaan Pendidikan SMP	Masih ada sekolah yang tidak respon/lambat dalam pengumpulan data	Data yang berbeda tiap waktu sehingga perhitungan kebutuhan tidak	Perencanaan dan penganggaran tidak berdasarkan hasil rekomendasi rapor	Monitoring dan evaluasi belum maksimal	Pelaporan belum dilaksanakan sesuai peraturan	Adanya pergantian Tim BOS sekolah

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-lain
			tepat	mutu masing-masing standar			
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Data real berbeda dengan yang terdapat pada Data Dapodik	Masih Banyak Guru yang berpendidikan SLTA atau sederajat	Harus sinkron dengan data Dapodik	Minimnya tenaga operator yang mengerti IT	Masih belum semua lembaga melaporkan	

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi

Tabel 4.4

Jenis Pelayanan Dasar Target Pencapaian dan Realisasi

OPD : Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		12.643	818	13461
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	3.000 vial	-	3.000 vial
1.2	Tablet Tambah Darah	1.654.170 tablet		1.654.170 tablet
1.3	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan Hb * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	346 test		346 test

1.4	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	-		-
1.5	Buku KIA	11.304 buku		11.304 buku
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		12248	891	13.139
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Formulir Fotograf	-		
1.2	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	-		
1.3	Buku KIA	11.304 buku		
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		12127	111	12.238
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Vaksin Hepatitis BO	11.000 buku	-	11.000 buku
1.2	Vitamin K1 Injeksi	630 sachet	-	630 sachet
1.3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	16.600 ampul	-	16.600 ampul
1.4	Formulir Bayi Baru Lahir	-	-	-
1.5	Formulir MTBM	-	-	-
1.6	Buku KIA	11.304 tube	-	11.304 tube
4. Pelayanan Kesehatan Balita				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		36.419	22.905	59.324
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total

1.1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (Kpsp) Atau Instrumen Standart Lain Yang Berlaku	-	-	-
1.2	Formulir Ddtk	-	-	-
1.3	Buku Kia	11.304 buku	-	11.304 buku
1.4	Vitamin A Biru	160	-	160
1.5	Vitamin A Merah	2.666	-	2.666
1.6	Vaksin Imunisasi Dasar: * Hbo * Bcg * Polio * Ipv * Dpt -Hb -Hib * Campak Rubell	31.840 Vial	-	31.840 Vial
1.7	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * Dpt -Hb -Hib * Campak Rubella	8.050 Vial	-	8.050 Vial
1.8	Jarum Suntik Dan Bhp	76.900 Pcs	-	76.900 Pcs
1.9	Peralatan Anafilaktik	-	-	-
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Layanan Kesehatan		14.481	5.786	20.267
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Buku Raport Kesehatanku	7.500	44.279	51.779
1.2	Buku Pemantauan Kesehatan	-	-	-
1.3	Kuesioner Skrining Kesehatan	-	-	-
1.4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	-	-	-
1.5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	-	-	-
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		142.028	331.246	473.274
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total

1.1	Pedoman Dan Media Kie * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * Kit Iva Tes - Posbindu Kit - KIT IV A Test - Strip Gula	- - 5.000	35 27 13.7028	35 27 142.208
1.2	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	-	-	-
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		12.988	33.408	46.396
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	2180 strip		2180 strip
1.2	Instrumen Geriatric Depression Scale (Gds), Instrumen Abbreviated Mental Test (Amt) Dan Instrumen Activity Daily Living (Adl) Dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3g)			
1.3	Buku Kesehatan Lansia	8.000 buku		8.000 buku
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		35.138	138.690	173.828
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Kie		27	27
1.2	Tensimeter		35	35
1.3	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Ptm		-	-

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		8.223	7.869	16.092
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet - Glukometer - Strip Gula	- 5.000	35 137.028	35 137.028
1.2	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Si Ptm			
1.3	Pedoman Dan Media Kie		27	27
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Bera				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (Odgj) Yang Terlayani Kesehatan		550	181	731
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (Ppdgj Iii) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)		27	27
1.2	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	58		58
1.3	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan			
1.4	Media Kie			
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		3.844	6.156	10.000
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total

1.1	Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	27 paket		27 paket
1.2	Reagen Zn Tb	-	-	-
1.3	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95 - Bedah - N95	- -	10.000 1.200	10.000 1.200
1.4	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering - Pot - Kaca Slide - BHP	22.000 buah 9720 pcs 27 paket	- - -	22.000 buah 9720 pcs 27 paket
1.5	Catridge Tes Cepat Molekuler	5.700 buah	-	5.700 buah
1.6	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	27 paket	-	27 paket
1.7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	27 paket	-	27 paket
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan		10.310	7.347	17.657
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Media Kie Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	30 paket		30 paket
1.2	Tes Cepat Hiv (Rdt) Pertama	12.000 test		12.000 test
1.3	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum S spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai *Alat Tulis * Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor Ktp/Nik	30 paket		30 paket

4.2.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran

OPD : Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 296.882.142	Rp272.953.592
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp 1.510.287.000	Rp576.990.798
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp 255.936.320	Rp255.306.080
4	Pelayanan kesehatan balita		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp128.612.650	Rp128.295.850
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rp162.815.500	Rp157.208.750
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bera	Rp426.504.000	Rp36.487.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Rp1.877.132.500	Rp1.775.709.300

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	REALISASI
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Rp549.441.500	Rp421.682.480

4.2.3 Permasalahandan Solusi

Tabel 4.6
Permasalahan Dan Solusi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
				Anggaran Untuk Mengatasi/ Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19			berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
							covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
							dan terkonfirmasi covid 19
4	Pelayanan kesehatan balita	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
		difasilitas layanan kesehatan	berdasarkan data BPS	Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
				Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Dilkukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
				Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	penularan covid-19		kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
				Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19			berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bera	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
							covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai langka protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kkuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Permasalahan dan Solusi					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
							dan terkonfirmasi covid 19
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dilakukan rutin setiap bulanya Berdasarkan laporan harian pemegang program difasilitas layanan kesehatan	Disesuaikan dengan target sasaran yang telah dilakukan perhitungan berdasarkan data BPS	Perencanaan Sudah Diperhitungkan Sesuai Kebutuhan Dengan Pemetaan Alokasi Bersumber Dana Dari APBD Dan APBN Serta Sumber Dana Sah Lainnya, Namun Di Awal Triwulan Tahun 2020 Pandemi SARS-COVID 19 Dioalami Negara Indonesia Termasuk Kota Balikpapan Per Maret 2020, Sehingga Dilakukan Refocusing Anggaran Untuk Mengatasi/Mengendalikan Penyebaran Pandemi Covid19	Pelaksanaan tidak maksimal berjalan dikarenakan pembatasan semua jenis kegiatan yang melibatkan berkumpulnya orang dalam jumlah tertentu sebagai protokol kesehatan sebagai upaya menekan penularan covid-19	Dampak akibat pelaksanaan yang tidak maksimal tentunya akan mempengaruhi proses pelaporan, capaian target kinerja dari sisi kuantitas dan kualitas mengalami penurunan	Kondisi excisting sejak awal dimana SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terbatas di fasilitas layanan kesehatan serta sejak awal pandemi covid 19 semua SDM kesehatan dan non kesehatan (penunjang) secara totalitas berkontribusi secara serentak dalam penanganan covid 19 bahkan beberapa nakes tidak sedikit yang terpapar dan terkonfirmasi covid 19

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi

Tabel 4.7

Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian dan Realisasi

OPD : Dinas Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian		
1.1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari		656,848	667,118	1,323,966
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Pelayanan Spam Jaringan Perpipaan	540,805	0	540,805
1.2	Pelayanan Spam Bukan Jaringan Perpipaan	132,738	0	132,738

4.3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.8

Alokasi dan Realisasi Anggaran

OPD : Dinas Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	24,744,600,000	24,744,600,000

4.3.3 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.9
Permasalahan Dan Solusi

OPD : Dinas Pekerjaan Umum

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan Dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-Lain
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	belum dilakukan pendataan menyeluruh untuk pelayanan air minum di Kota Balikpapan	masih memakai asumsi kebutuhan air tiap orang sesuai peraturan PUPR untuk kota besar	Peningkatan SDM			

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi

Tabel 4.10

Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian dan Realisasi

OPD : Dinas Perumahan dan Permukiman

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian		
1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		nihil	Nihil	Nihil
Apakah Terjadi Bencana Di Daerah Anda ?		nihil	Nihil	Nihil
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana			

1.2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	nihil	Nihil	Nihil
1.3	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	nihil	Nihil	Nihil
1.4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	nihil	Nihil	Nihil
2. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni		nihil	Nihil	Nihil
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	nihil	Nihil	nihil
1.2	Subsidi Uang Sewa	nihil	nihil	Nihil
1.3	Penyediaan Rumah Layak Huni	nihil	nihil	nihil
3. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Pelayanan Spald-S Dengan Kualitas Pelayanan Akses Dasar Bagi Masyarakat Yang Bermukim Di Wilayah Pengembangan Spald-S Dengan Kondisi Wilayah Perdesaan Dan Memiliki Kepadatan Penduduk Lebih Kecil Dari 25 Jiwa/Ha	nihil	nihil	nihil
1.2	Pelayanan Spald-S Dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman Bagi Masyarakat Yang Bermukim Di Wilayah Pengembangan Spald-S Dengan Kondisi Wilayah Pedesaan Yang Memiliki Kepadatan Penduduk Lebih Besar Dari 25 Jiwa/Ha Dan Seluruh Wilayah Perkotaan	nihil	nihil	nihil

1.3	Pelayanan Penyediaan Prasarana Dan /Atau Jasa Melalui Spald-T Dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman Penerima : Masyarakat Yang Bermukim Di Wilayah Pengembangan Spald-T	nihil	nihil	nihil
-----	--	-------	-------	-------

4.4.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran

OPD : Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	nihil	nihil
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	nihil	nihil
3	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	nihil	nihil

4.4.3 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.12
Permasalahan Dan Solusi

OPD : Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-lain
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah	belum dilakukan pendataan	belum dilakukan	belum ada	belum dilakukan	belum dilakukan	

2	yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	belum dilakukan pendataan		belum ada	belum dilakukan	belum dilakukan	
3	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	keterbatasan biaya		refocusing			

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi

Tabel 4.13

Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian dan Realisasi

OPD : Satpol PP

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian		
1. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu Dan Pelayanan Ganti Rugi				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Capaian Penegakan Perda Sesuai Mutu Dan Pelayanan Ganti Rugi		Nihil	Nihil	Nihil
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil	Nihil	Nihil	Nihil
1.2	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Pelayanan Pengobatan	Nihil	Nihil	Nihil
2. Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu		Nihil	Nihil	Nihil
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Penegakan Perda Sesuai Sop	Nihil	Nihil	Nihil
1.2	Pelaksanaan Penegakan Perda Sesuai Dengan Standar Jumlah Sdm Pol Pp Dan Linmas Yang Sesuai Standar	Nihil	Nihil	Nihil
1.3	Pelaksanaan Penegakan Perda Menggunakan Sarpras Sesuai Standar	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 4.14

Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian dan Realisasi

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian		
3. Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Di 6 Kecamatan		Nihil	100	
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Pemetaan Terhadap Lokasi/Daerah Rawan Bencana Melalui Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	-	0	0
1.2	Identifikasi Dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana	-	6	6
1.3	Identifikasi Warga Yang Berpotensi Menjadi Korban Bencana	-	0	0
1.4	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana	-	0	0
1.5	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik Per Jenis Bencana	-	0	0
4. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Simulasi Dan Sosialisasi Di 6 Kecamatan Serta Ketersediaan Upt Penanggulangan Bencana Di Setiap Kecamatan			100 Orang	100
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	0	0

5. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Penanganan Kebencanaan Yang Telah Di Laksanakan		6376 Kejadian, 41 Korban Jiwa		
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	331	-	
1.2	Pendataan Terhadap Warga Yang Terkena/Menjadi Korban Bencana	6413	-	6413
1.3	Melakukan Respon Cepat Klb Dan Respon Cepat Darurat Bencana	-	0	
1.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	-	1
1.5	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencan	-	6163	6163
1.6	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa			
1.7	(Klb) Penyakit Klb/Wabah Zoonosis Perioritas	5902	-	5902
6. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Penanganan Kebakaran Yang Telah Di Laksanakan		38 Kejadian, 289 Korban Jiwa		
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Melalui Pendataan Dan Verifikasi Faktual Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran Atau Terdampak	-	72	72
1.2	Layanan Pendataan, Inspeksi Dan Investigasi Dengan Mengeluarkan Surat Keterangan Korban Kebakaran Yang Diperuntukkan Bagi Pengurusan Surat Berharga Dan Identitas Kependudukan	-	72	72

4.5.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran

OPD : Satpol PP

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Rp 4,778,257,041	Rp 3,681,328,803

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Alokasi
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Rp 24,000,000	Rp 23,320,000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp 54,640,000	Rp 51,450,000
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 248,198,000	Rp 207,915,200
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Rp 550,000,000	Rp 493,302,645

4.5.3 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.17
Permasalahan Dan Solusi

OPD : Satpol PP

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-lain
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi						
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu						

Tabel 4.18
Permasalahan Dan Solusi

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-lain
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian, dan Realisasi

Tabel 4.19

Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian dan Realisasi

OPD : Dinas Sosial

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian		
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		344	1203	1547
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-
1.2	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-
1.3	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-
1.4	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-
1.5	Penyediaan Permakanan	32	-	32
1.6	Penyediaan Sandang	4	-	4
1.7	Penyediaan Alat bantu	-	-	-
1.8	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-
1.9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	49	-	49
1.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	-	-	-
1.11	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	10	-	10

1.12	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	4	-	4
1.13	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	3	-	3
1.14	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-
1.15	Layanan Rujukan	1	-	1
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		265	35	300
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Layanan Data dan Pengaduan	1	-	1
1.2	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-
1.3	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-
1.4	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-
1.5	Penyediaan Permakanan	8	-	8
1.6	Penyediaan Sandang	8	-	8
1.7	Penyediaan Alat bantu	-	-	-
1.8	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	8	-	8
1.9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-
1.10	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Anak Terlantar	-	-	-
1.11	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	5	-	5
1.12	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	8	-	8
1.13	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	3	-	10

1.14	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5	-	5
1.15	Layanan Rujukan	10	-	
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		44	153	197
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Layanan Data dan Pengaduan	-	1	1
1.2	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-
1.3	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-
1.4	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-
1.5	Penyediaan Permakanan	41	-	41
1.6	Penyediaan Sandang	21	-	21
1.7	Penyediaan Alat bantu	-	-	-
1.8	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-
1.9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-
1.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	-	-	-
1.11	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas	5	-	5
1.12	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	21	-	21
1.13	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	6	-	6
1.14	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6	-	6
1.15	Layanan Rujukan	21	-	21

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial				
Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		339	-	339
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Layanan Data dan Pengaduan	-	1	1
1.2	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	-	1
1.3	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-
1.4	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-
1.5	Penyediaan Permakanan	266	-	266
1.6	Penyediaan Sandang	266	-	266
1.7	Penyediaan Alat bantu	1	-	1
1.8	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	2	-	2
1.9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	266	-	266
1.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	-	0	0
1.11	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	50	-	50
1.12	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	60	-	60
1.13	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	190	-	190
1.14	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	190	-	190
1.15	Layanan Rujukan	76	-	76
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota				

Indikator Outcome		Terlayani	Belum Terlayani	Total
Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		570	-	570
No	Indikator Output	Tersedia	Belum Tersedia	Total
1.1	Penyediaan Permakanan	6	-	6
1.2	Penyediaan Sandang	257	-	257
1.3	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	62	-	62
1.4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	245	-	245
1.5	Pelayanan Dukungan Psikososial		-	

4.6.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 4.20
Alokasi dan Realisasi Anggaran

OPD : Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Rp 283,951,000.00	Rp 274,295,200.00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Rp 366,570,950.00	Rp 197,344,975.00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Rp 183,497,670.00	Rp 139,866,288.00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 1,379,588,600	Rp 1,193,445,892
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Rp 254,927,000	Rp 140,978,809

4.6.3 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.21
Permasalahan Dan Solusi

OPD : Dinas Sosial

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-lain
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Data Penyandang Disabilitas yang selalu mengalami perubahan	Penghitungan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan anggaran yang tersedia	Perencanaan berdasarkan kebutuhan dari penyandang disabilitas dan terkait dengan keterbatasan anggaran	Pelaksanaan kegiatan penyandang disabilitas berdasarkan pada anggaran serta sarana yang ada	Berdasarkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan	Belum adanya UPTD khusus melayani penyandang disabilitas terlantar serta pelayanan untuk penyandang disabilitas belum maksimal dikarenakan kurangnya SDM serta fasilitas yang mendukung untuk kegiatan penyandang disabilitas masih kurang

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-lain
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak masih terbatas yang hanya dilayani / dirujuk ke Dinas Sosial	Tidak dapat dihitung kebutuhan secara terperinci karena tergantung trend kasus anak di tahun berjalan	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti krn tergantung kasus yang ada	Sesuai dengan kasus yang terjadi	Sesuai dengan pelaksanaan kasus yang terjadi	Belum ada kendaraan operasional, LPKS milik pemerintah kota dan UPTD khusus yang melayani PMKS anak, pelayanan di RPSA belum maksimal
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Data lanjut usia terlantar masih terbatas yang hanya dilayani / dirujuk ke Dinas Sosial	Tidak dapat dihitung kebutuhan secara terperinci karena tergantung trend kasus lanjut usia di tahun berjalan	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti krn tergantung kasus yang ada	Sesuai dengan kasus yang terjadi	Sesuai dengan pelaksanaan kasus yang terjadi	Belum ada kendaraan operasional, UPTD khusus yang melayani lanjut usia, pelayanan di RPLUT belum maksimal
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tuna sosial	Tidak dapat dihitung kebutuhan secara terperinci karena tergantung jumlah	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti karena tergantung kasus yang	Sesuai dengan kasus yang terjadi	Sesuai dengan pelaksanaan kasus yang terjadi	Belum adanya UPTD khusus melayani tuna sosial yang

No	Uraian	Permasalahan					
		Pengumpulan Data	Penghitungan Kebutuhan	Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Lain-lain
	Pengemis di Luar Panti Sosial	khususnya gelandangan dan pengemis masih terbatas yang hanya dilayani / dirujuk ke Dinas Sosial, tidak ada pendataan secara berkala	kasus di tahun berjalan	ada			sifatnya residensial sehingga pelayanan belum maksimal dikarenakan kurangnya fasilitas yang mendukung
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Data Korban Bencana diambil dari pihak Kelurahan yang terjadi bencana	Tidak dapat dihitung kebutuhan secara terperinci karena tergantung trend kasus lanjut usia di tahun berjalan	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti krn tergantung kasus yang ada	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti krn tergantung kasus yang ada	Pelaporan dibuat setiap bulan	Belum tersedianya gudang yang memenuhi standar (Representatif) dan jumlah bantuan belum bisa terpenuhi sesuai dengan Anggaran



BAB V - PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dalam rangka wujud pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Selain daripada itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya good governance.

Dalam Perspektif yang lebih luas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 yang akan dipublikasikan secara luas melalui website Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Terima kasih.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela



LAMPIRAN 2.2.1



2.2.1 INDIKATOR KENERJA KUNCI KELUARAN

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	jumlah satuan pendididkn anak Usia Dini terkakreditasi (Negeri dan Swasta)	178	178	Disdik
			2	jumlah pesrta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	10.965	10.965	Disdik
			3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	0	Disdik
			4	jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.312	1.312	Disdik
			5	Jumlah Pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.232	1.232	Disdik
			6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma IV (D IV) atau sarjana S.1 Bidang pendidikan Anak Usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	894	894	Disdik
			7	Jumlah kepala sekola PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 Sertifikat pendidik dan surat tnda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekola untuk PAUD Formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	1	1	Disdik
	2	tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	1	jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	137	137	Disdik
			2	Jumlah peserta didik SD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	71.279	71.279	Disdik

3	Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	32.962	32.962	Disdik
4	jumlah peserta didik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	71.279	71.279	Disdik
5	jumlah peserta didik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	32.962	32.962	Disdik
6	jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	3.524	3.524	Disdik
7	jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1.860	1.860	Disdik
8	jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	3.309	3.309	Disdik
9	jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1.679	1.679	Disdik
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	453	453	Disdik
11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	286	286	Disdik
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	439	439	Disdik
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	286	286	Disdik

		14	Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	3.104	3.104	Disdik
		15	Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	1.629	1.629	Disdik
		16	Jumlah kepala sekola pada jenjang SD Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	174	174	Disdik
		17	Jumlah kepala sekola pada jenjang SMP Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	50	50	Disdik
		18	Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	414	414	Disdik
		19	Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	247	247	Disdik
3	Tingkat partisipasi warga negara Usia 13-15 tshun ysng berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Yang Terakreditasi	137	137	Disdik
		2	Jumlah peserta didik SD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	71.279	71.279	Disdik
		3	Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	32.962	32.962	Disdik
		4	jumlah peserta didik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	71.279	71.279	Disdik
		5	jumlah peserta didik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	32.962	32.962	Disdik

6	jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	3.524	3.524	Disdik
7	jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1.860	1.860	Disdik
8	jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	3.309	3.309	Disdik
9	jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1'679	1'679	Disdik
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	453	453	Disdik
11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	286	286	Disdik
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	439,000	439,000	Disdik
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	286	286	Disdik
14	Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	3.309	3.309	Disdik
15	Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	1.629	1.629	Disdik
16	Jumlah kepala sekola pada jenjang SD Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	174	174	Disdik

		17	Jumlah kepala sekola pada jenjang SMP Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	50	50	Disdik
		18	Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	414	414	Disdik
		19	Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	247	247	Disdik
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1	jumlah satuan pendidikan Kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	9	9	Disdik
		2	jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar dari pemerintah daerah	4.786	4.786	Disdik
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.786	4.786	Disdik
		4	jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	269	269	Disdik
		5	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	4.786	4.786	Disdik
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma IV (D IV) atau sarjana S.1	183	183	Disdik
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 Sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	15	15	Disdik
		8	jumlah kepala sekolah pada satuan kependidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1	15	15	Disdik

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	OPD	KET
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN	1	Rasio Daya tampung Rumah sakit rujukan	1	jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2	Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS yang dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3	Presentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Antenatal	1233	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4	Presentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1233	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5	Presentase Bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1223	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	2424	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (7-15) sesuai standar	2462	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2425	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2436	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2436	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2425	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

		2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2393	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2402	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50%	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2425	DKK	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	CAPAIAN	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kab/Kota (ha)	8694	DPU/SDA
			2	panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m)	184460	DPU/SDA
			3	luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/kota (ha)	0	DPU/SDA
			4	panjang pantai dikawasan permukiman yang rawan abrasi,erosi,akresi di WS kewenangan Kab/kota (m)	0	DPU/SDA
			5	rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD air WS kewenangan Kab/kota	0	DPU/SDA
			6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD air kewenangan Kab/kota	0	DPU/SDA
			7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota.	400	DPU/SDA
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kab/Kota (ha)	16456	DPU/SDA
			2	panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m)	194555	DPU/SDA
			3	luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/kota (ha)	1111	DPU/SDA

			4	panjang pantai dikawasan pemukiman yang rawan abrasi,erosi,akresi di WS kewenangan Kab/kota (m)		11160,31		DPU/SDA
			5	rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD air WS kewenangan Kab/kota		0		DPU/SDA
			6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD air kewenangan Kab/kota		0		Disperkim dan DPU
			7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota.		0		DPU/SDA
	3	Rasio luas Daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1	presentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	1106	32,6%	DPU/SDA
					panjang jaringan irigasi primer (m)	3397		DPU/SDA
			2	presentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	660	18,0%	DPU/SDA
					panjang jaringan irigasi sekunder (m)	3659		DPU/SDA
			3	presentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)	0	0,0%	DPU/SDA
					panjang jaringan irigasi tersier (m)	8465		DPU/SDA
	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh	1	pemenuhan dokume RISPAM kab/kota		ada		DPU
			2	tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota		ada, tetapi belum diterapkan		DPU
			3	jumlah BUMD dan atau UPTD kab/kota penyelenggaraan SPAM		1 BUMD		DPU

			4	jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Belum pernah	DPU	
			5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain	1	DPU	
	5	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	jumlah rumah tangga dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	5493	Disperkim	
			2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3333	Disperkim	
			3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	8826	Disperkim	
			4	jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	122	Disperkim	
			5	jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	122	Disperkim	
			6	jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	8826	Disperkim	
			7	kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik	186779	Disperkim
				rumh diwilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa/ha	0	Disperkim	
			8	kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	5493	Disperkim
				rumh diwilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa/ha	Tidak ada	Disperkim	

			9	kinerja penyediaan pelayanan SPALD T Akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	1080	Disperkim			
					rumah diwilayah pengembangan SPALDT	3528	Disperkim			
			10	kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	5493	Disperkim			
					jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S	202539	Disperkim			
			11	kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	7	Disperkim			
					jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	9	Disperkim			
			12	kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	20	Disperkim			
					jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	30	Disperkim			
			13	kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	1080	Disperkim			
					jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kota	1080	Disperkim			
			14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	122	Disperkim			
					jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S	202539	Disperkim			
				6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku	6	DPMPT

			jumlah bangunan Gedung (kecuali rumha tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	464	DPMPT
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas ijin Lokasi		0	DPMPT
		jumlah izin lokasi yang diterbitkan		27.386.782 m2	DPMPT
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA/TIDAK	Tidak ada	DPU/GP	
4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA/TIDAK	Tidak ada	DPU/GP	
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Tidak ada	DPU/GP	
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Tidak ada	DPU/GP	
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		63 gedung	DPU/GP	
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		63 gedung	DPU/GP	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		501.18 km	DPU/JJ
		2 Panjang jalan yang dibangun		2195 meter	DPU/JJ

			3	Panjang jembatan yg dibangun	0	DPU/JJ
			4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	6888,90 meter	DPU/JJ
			5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	110.35 meter	DPU/JJ
			6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	9651.3 meter	DPU/JJ
			7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	91.9 meter	DPU/JJ
			8	Panjang jalan yang dipelihara	3609,7 meter	DPU/JJ
			9	Panjang jembatan yang dipelihara	42,5 meter	DPU/JJ
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	1	DPU
			2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	18775	DPU
			3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	405	DPU
			4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak ada	DPU

5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak ada	DPU
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	DPU
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	DPU
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	DPU
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak ada	DPU
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang	Tidak ada	DPU
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada	DPU
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak ada	DPU
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	DPU
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DPU
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPU

		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPU
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPU
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada	DPU
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	DPU
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	DPU
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	DPU
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DPU
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPU
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPU
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPU

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM

		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM	
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM	
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM	
	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	5,40Ha	5,40Ha	DIPERKIM
			2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	169	169	DIPERKIM
			3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1	Jumlah rumah di kab/kota	202539	202539	DIPERKIM
			2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	169	169	DIPERKIM
			3	Jumlah rumah tidak layak huni	578	578	DIPERKIM

		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	202539	202539	DIPERKIM	
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	236,252	236,252	DISDUKCAPIL
				jumlah Total Unit rumah	202539	202539	DIPERKIM
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	0	0	DIPERKIM	
	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	17536	17536	DIPERKIM
			3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
			7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM

		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	NIHIL	NIHIL	DIPERKIM
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	50	50	DIPERKIM

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	4008	4008	SATPOLPP	
			2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	NIHIL	NIHIL	SATPOLPP	
			3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	26	26	SATPOLPP	
			4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4	4	SATPOLPP	
			5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Permendagri NO.54 Tahun 2011		SATPOLPP	
			6	Tersedianya sarana prasarana minimal	belum tercapai standar mutu pelayanan baik SDM, Anggaran dan SARPRAS	0	0	SATPOLPP
	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/lega	kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0	BPBD
					jumlah satuan dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	0	0	BPBD
			2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	jumlah penduduk dikawasan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0	0	BPBD
					seluruh penduduk dikawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0	0	BPBD

	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0	BPBD		
					jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0	0	BPBD		
			2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	100	0	BPBD		
					jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan	0		BPBD		
			3	Persentase jumlah aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan	jumlah aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan	0	0	BPBD		
					jumlah aparaturn dengan warga negara dikawasan rawan bencana	0			0	
			4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100	0	BPBD		
					jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	0			0	
			5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdolops	0	0	BPBD		
					jumlah wraga negara yang berada dikawasan rawan bencana	0			0	
			6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	0	0	BPBD		
					jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	0			0	
			5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	0	0	RPRN

				jumlah seluruh penetapan status KLB	0	0	BPBD	
			2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	0	0	BPBD
					jumlah seluruh penetapan status darurat	0	0	
			3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	241	100%	BPBD
					jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	241		
			4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	0	0	BPBD
					perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	0	0	
	6	presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	248 kejadian	1 kegiatan	BPBD	
			2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada	ada		
			3	Tersedianya aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) dikantor kecamatan	241 orang	241 orang	BPBD	
			4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	6 UPTD PBD 2 Sektor UPTD PBD			

5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	ada	ada	BPBD
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	50 orang		BPBD
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	tidak ada		BPBD
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	tidak ada		BPBD

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Layanan Pengaduan Anak (1 layanan)	1		DINSOS
					Layanan data dan pengaduan untuk penyandang disabilitas tidak ada	0		DINSOS
					Layanan data dan pengaduan untuk gelandangan dan pengemis tidak ada	0		DINSOS
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	- PMKS Anak	300		DINSOS
					- Lanjut usia terlantar	39,229		DINSOS
					- Penyandang Disabilitas	1547		DINSOS
					- PMKS Tuna Sosial	136		DINSOS
			3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0		DINSOS	
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	- PMKS Anak	265		DINSOS
					- Lanjut usia terlantar	44		DINSOS

			- Penyandang Disabilitas terlantar (925 orang)	925		DINSOS
			- PMKS Tuna Sosial 339 orang	339		DINSOS
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		- Rehabilitasi Sosial (ODGJ)	1		DINSOS
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		- lanjut usia	20		DINSOS
			- Penyandang Disabilitas Terlantar	28		DINSOS
			- PMKS Tuna Sosial	266		DINSOS
7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		- RPSA	1		DINSOS
			- RPLUT	1		DINSOS
			- Asrama Penyandang Disabilitas	1		DINSOS
			- Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	1		DINSOS
			- Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS	1		DINSOS

8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	- PMKS Anak (3 orang),	3		DINSOS
		- lanjut usia	44		DINSOS
		- Penyandang Disabilitas	4		DINSOS
		- PMKS Tuna Sosial	266		DINSOS
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	- PMKS Anak	0		DINSOS
		- lanjut usia	0		DINSOS
		- Penyandang Disabilitas	32		DINSOS
		- Tuna Sosial	5		DINSOS
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	- RPSA	0		DINSOS
		- RPLUT	0		DINSOS
		- Asrama Penyandang Disabilitas	2		DINSOS

					- Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa	1		DINSOS
			11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	- RPSA	3		DINSOS
					- RPLUT	0		DINSOS
					- Asrama Penyandang Disabilitas	0		DINSOS
					- Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa	1		DINSOS
					- Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS	1		DINSOS
					12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	- PMKS Anak	3
			- lanjut usia	0				DINSOS
			- Penyandang Disabilitas	4				DINSOS
			- PMKS Tuna Sosial	30				DINSOS
			13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		0		DINSOS

			14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		0		DINSOS
			15	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	- PMKS Anak	265		DINSOS
					- Lanjut usia terlantar	44		DINSOS
					- Penyandang Disabilitas	344		DINSOS
					- PMKS Tuna Sosial	266		DINSOS
			16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		0		DINSOS
			17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	- PMKS Anak	5		DINSOS
					- Lanjut usia terlantar	5		DINSOS
					- Penyandang Disabilitas	4		DINSOS
					- PMKS Tuna Sosial (50		DINSOS
			18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan		265		DINSOS

			pendidikan dan Kesehatan dasar	- Lanjut usia terlantar	44		DINSOS
				- Penyandang Disabilitas	344		DINSOS
				- PMKS Tuna Sosial	60		DINSOS
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	- PMKS Anak	5		DINSOS
				- Lanjut usia terlantar	5		
				- Penyandang Disabilitas	4		DINSOS
				- PMKS Tuna Sosial	190		DINSOS
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anakterlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	- PMKS Anak	3		DINSOS
				- Lanjut usia terlantar	3		DINSOS
				- Penyandang Disabilitas	2		DINSOS
				- PMKS Tuna Sosial	190		DINSOS
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	- PMKS Anak	5		DINSOS
				- Lanjut usia terlantar	6		DINSOS

				- Penyandang Disabilitas	2		DINSOS
				- PMKS Tuna Sosial	76		DINSOS
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		358	358	DINSOS
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		358	358	DINSOS
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		50	50	DINSOS
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		50	50	DINSOS
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	ADA/TIDAK	0	0	DINSOS
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		176	177	DINSOS

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI TENAGA KERJA	1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	1	DISNAKER	
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	realisasi indikator	4	275%	DISNAKER
					target indikator realisasi	5		DISNAKER
					realisasi	4		DISNAKER
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	11	DISNAKER		
	2	Persentase tenaga kerja ber sertifikat kompetensi	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi kluster	jumlah penerapan program PKB kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahunnya (n)	2	100%	DISNAKER
					keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun kluster pada tahun (n)	2		DISNAKER
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah insruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2020	130	78,31%	DISNAKER
					jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2020	166		DISNAKER
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah isntruktur pada tahun 2020	151	76,26%	DISNAKER

		Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020	198	100%	DISNAKER
4	Persentase LPK yang terakreditasi	jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020	2	5,26%	DISNAKER
		jumlah seluruh LPK pada tahun 2020	38		DISNAKER
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2020	38	100%	DISNAKER
		jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020	38		DISNAKER
6	Jumlah penganggur yang dilatih Sudah cukup jelas		198	198	DISNAKER
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pada pelatihan bersertifikat pada tahun 2020	198	100%	DISNAKER
		jumlah orang yang dilatih pada tahun 2020	198		DISNAKER
8	Persentase penyerapan lulusan	jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2020	129	65,15%	DISNAKER
		jumlah lulusan pada tahun 2020	198		DISNAKER
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2020	54	27,27%	DISNAKER
		jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2020	198		DISNAKER

			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	jumlah CPMI dilatih	0	0,00%	DISNAKER
					jumlah CPMI Terdaftar	0		DISNAKER
			11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		0	0	DISNAKER
3	tingkat produktifitas tenaga kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas pada tahun 2020	20	0,71%	DISNAKER	
				jumlah perusahaan pada tahun 2020	2812		DISNAKER	
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi	1,8-2,3 %	DISNAKER		
				pertumbuhan modal	0	0	DISNAKER	
				pertumbuhan tenaga kerja	7.38%	138	BAPEDDA	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020	138	100%	DISNAKER	
				jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	138		DISNAKER	
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020	4	2,52%	DISNAKER	
				jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	159		DISNAKER	
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		159	159	DISNAKER	

4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	26	100%	DISNAKER
		jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP/PKB)	26		DISNAKER
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	2818	100%	DISNAKER
		jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	2812		DISNAKER
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	jumlah perusahaan yang berselisih	72	2,56%	DISNAKER
		jumlah perusahaan pada tahun 2020	2812		DISNAKER
7	Jumlah mogok kerja	jelas	0	0	DISNAKER
8	Jumlah penutupan perusahaan	jelas	0	0	DISNAKER
9	Jumlah perselisihan kepentingan	SDA	4	4	DISNAKER
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	SDA	0	0	DISNAKER
11	Jumlah perselisihan PHK	SDA	62	62	DISNAKER
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	SDA	196	196	DISNAKER

			13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	SDA	37	37	DISNAKER
			14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/tidak	ADA	ADA	DISNAKER
			15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	jumlah perjanjian bersama	37	37	DISNAKER
					jumlah kasus perselisihan	72	72	DISNAKER
	5	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	jelas	722	722	DISNAKER
			2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	SDA	4312	4312	DISNAKER
			3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	SDA	19	19	DISNAKER
			4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	SDA	131	131	DISNAKER
			5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	SDA	2	2	DISNAKER
			6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	SDA	0	0	DISNAKER
			7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	SDA	1596	1596	DISNAKER
			8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	SDA	937	937	DISNAKER

9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	0	0%	DISNAKER
		jumlah CPMI	0		DISNAKER
		jumlah CTKI	0		DISNAKER
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		0	0	DISNAKER
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	jumlah faslitas yang dipulangkan	0	0%	DISNAKER
		jumlah PMI yang pulang	0		DISNAKER
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	jumlah PMI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	0%	DISNAKER
		jumlah TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		DISNAKER
		Jumlah PMI	0		DISNAKER
		jumlah TKI	0		DISNAKER
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	0	0%	DISNAKER

				Jumlah PMI atau TKI purna dan keluarganya	0	0	DISNAKER
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		0	0	DISNAKER

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34	34	DP3AKB	
			2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	19	19	DP3AKB	
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	DP3AKB	
			2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	28	28	DP3AKB	
			3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	35	100%	DP3AKB
					jumlah korban kekerasan anak ditingkat provinsi	35		
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	30 lembaga		DP3AKB	
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	29 Lembaga		DP3AKB	
	3	rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPI (per 10.000 penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	9	9	DP3AKB	
			2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1131	1131	DP3AKB	

3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		34	34	DP3AKB
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		34	34	DP3AKB
5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		1	1	DP3AKB
6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		4	4	DP3AKB
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	39	100%	DP3AKB
		jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	39		DP3AKB

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	tidak	tidak	DP3
			2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak	tidak	tidak	DP3
			3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak	tidak	tidak	DP3
			4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam	Tidak ada	Nilai PPH 87,8 (AKE 2000) dari target T.A 2020 skor 85	Nilai PPH 87,8 (AKE 2000) dari target T.A 2020 skor 85	DP3
			5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak	tidak	tidak	DP3
			6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak	tidak	tidak	DP3
			7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Ada/tidak	tidak	tidak	DP3
			8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak ada	Pengawasan PSAT 100% dari target T.A.2020 86 %	Pengawasan PSAT 100% dari target T.A.2020 86 %	DP3

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	CAPAIAN	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN	1	Persentase pemanfaatan Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	jumlah izin lokasi yang diterbitkan	NIHIL	NIHIL	DPPR
					jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	NIHIL	NIHIL	DPPR
					jumlah permohonan izin lokasi dalam satu tahun	NIHIL	NIHIL	DPPR
			2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	NIHIL	NIHIL	DPPR
					jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	NIHIL	NIHIL	DPPR
			3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum absentee	NIHIL	NIHIL	DPPR
					jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	NIHIL	NIHIL	DPPR
			4	Dokumen Izin membuka tanah	jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui	1345	1345	DPPR
					jumlah izin membuka tanah yang ditolak	414	414	DPPR
					jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	1754	1754	DPPR
			5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	3	3	DPPR
					jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	1	1	DPPR

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap:			DLH	
				a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	a. Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara (IKU)	40,9	40,9	DLH
				b. Indeks tutupan hutan (ITH)	b. Indeks tutupan hutan (ITH)	88,92	88,92	DLH
				c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	55,40	55,40	DLH
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	104	104	DLH
					2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	ADA	ADA	DLH
					3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	7	7	DLH
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kot	izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemkot	69	69	DLH
					izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kota	48	48	DLH
					izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kota	NIHIL	NIHIL	DLH
					jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	117	117	DLH

2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	jumlah PPLHD yang ada	1	1	DLH
		jumlah izin kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan diterbitkan oleh PEMDA kota	69	69	DLH
		izin PPLH yang izin lingkungan diterbitkan oleh PEMDA kota	48	48	DLH
		jumlah PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA kota	1	1	DLH
3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Masyarakat	Jumlah MHA yang diakui	NIHIL	0%	DLH
		jumlah usulan MHA	NIHIL		DLH
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA Yang mendapatkan pelatihan	NIHIL	0%	DLH
		jumlah MHA yang ada	NIHIL		DLH
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana	16	100%	DLH
		target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	16		DLH
6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	pengaduan msyarakat yangditangani	25	100%	DLH
		total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	25		DLH

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Kependudukan dan catatn sipil	1	penerbitan akta perkawinan	Jumlah Akta perkawinan yang di terbitkan	384	100%	DISDUKCAPIL
					Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	384		DISDUKCAPIL
			2	Penerbitan akta Perceraian	Jumlah Akta Perceraian yang di terbitkan	39	100%	DISDUKCAPIL
					Peristiwa perceraian yang dilaporkan	39		DISDUKCAPIL
			3	Penerbitan akta Kematian	Jumlah Akta Kematian yang di terbitkan	4216	100%	DISDUKCAPIL
						Peristiwa Kematian yang dilaporkan		4216
			4	Penyajian data kependudukan	Jumlah Penyajian data kependudukan Sekala Kota dalam 1 tahun	36	1800%	DISDUKCAPIL
						2 tahun		2

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	OPD	KETERANGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	PEMERINTAHAN	Kota Balikpapan tidak mempunyai Desa tertinggal dan Desa Mandiri
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	PEMERINTAHAN	Kota Balikpapan tidak mempunyai Desa tertinggal dan Desa Mandiri
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	PEMERINTAHAN	Kota Balikpapan tidak mempunyai Desa tertinggal dan Desa Mandiri
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	PEMERINTAHAN	Kota Balikpapan tidak mempunyai Desa tertinggal dan Desa Mandiri
	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	PEMERINTAHAN	Kota Balikpapan tidak mempunyai Desa tertinggal dan Desa Mandiri
			2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	PEMERINTAHAN	Kota Balikpapan tidak mempunyai Desa tertinggal dan Desa Mandiri
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	PEMERINTAHAN	Kota Balikpapan tidak mempunyai Desa tertinggal dan Desa Mandiri
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	PEMERINTAHAN	Kota Balikpapan tidak mempunyai Desa tertinggal dan Desa Mandiri

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ADA/TIDAK	0	0	DP3AKB
			2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		0	0	DP3AKB
			3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 1519)		0	0	DP3AKB
			4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK(avokasi dan KIE)	7822	92,57%	DP3AKB
					jumlah sasaran masyarakat program (KKBPK dan KIE)	8450		
			5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	8	8	DP3AKB	
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	64	100%	DP3AKB
					jumlah faskes	64		DP3AKB
			2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah peserta KB aktif	19,15	0%	DP3AKB

				jumlah PUS	103.169		DP3AKB	
		3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	0		DP3AKB	
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi caramodern	4,226	34%	DP3AKB	
				jumlah sasaran peserta KB pasca peralihan	12,316		DP3AKB	
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	14480	14480	DP3AKB	
			2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	0	0	DP3AKB
					Jumlah keluarga PBI	0		DP3AKB

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD			
URUSAN PERHUBUNGAN	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	33,33	200%	DISHUB		
					jumlah fasilitas penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	16,67		DISHUB		
			2	Terlaksananya pelayanan uji berkali	Jumlah kendaraan yang diuji pertahun	22248	92%	DISHUB		
					jumlah kendaraan wajib uji	24066		DISHUB		
			3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	jumlah penerapan tarif lintas penyeberangan	0	0	DISHUB		
					jumlah lintas penyeberangan daam kota	0		DISHUB		
			4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	jumlah pemasangan perlengkapan jalan kota	907	13,62%	DISHUB		
					target kebutuhan perlengkapan jalan kota	6659		DISHUB		
			2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	jumlah pemasangan perlengkapan jalan kota	907	13,62%	DISHUB
							target kebutuhan perlengkapan jalan kota	6659		DISHUB

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	34	100%	DISKOMINFO
					jumlah perangkat daerah	34		ORGANISASI
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh dinas kominfo	34	100%	DISKOMINFO
					jumlah perangkat daerah	34		ORGANISASI
	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		tidak	DISKOMINFO			
	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai	jumlah kegiatan event perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	76	90,48%	DISKOMINFO
					Jumlah kegiatan perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah	84		DISKOMINFO
			2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai dengan standar	34	100%	DISKOMINFO
					jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO
			3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	34	100%	DISKOMINFO

				jumlah perangkat daerah	34		ORGANISASI	
			4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	layanan SPBE (layanan Publik dan layanan adminitrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah di implementasikan secara eletronik	102	100%	DISKOMINFO
					jumlah layanan	102		DISKOMINFO
			5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	layanan SPBE (layanan Publik dan layanan adminitrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat eletronik	12	11,76%	DISKOMINFO
					jumlah layanan	102		DISKOMINFO
			6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	jumlah sistem eletronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0%	DISKOMINFO
					jumlah sistem eletronik	0		DISKOMINFO
			7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dngan sitem penghubung layanan pemerintah	19		DISKOMINFO
					jumlah layana publik dan layanan adminstrasi	102		DISKOMINFO
			8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat dan pemerintah	11	32,35%	DISKOMINFO
					jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO

9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	jumlah perangkat daerah yang menyimpan data dipusat	2	5,88%	DISKOMINFO
		jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	0	0,00%	DISKOMINFO
		jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	jumlah data yang dapat berbagi pakai	7	6,86%	DISKOMINFO
		jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	102		DISKOMINFO
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	9	26,47%	DISKOMINFO
		jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	jumlah ASN pengeola TIK yang tersrtifikasi kompetensi dibawah pengolaan dinas kominfo	0	0%	DISKOMINFO
		jumlah ASN pengeola TIK	8		DISKOMINFO
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	1. Dokumen Master	ada	ada	DISKOMINFO
		2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK	ada	ada	DISKOMINFO

3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	jumlah komunitas masyarakat atau mitras strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	0	0%	DISKOMINFO
				komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah provinsi	0		DISKOMINFO
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0	0%	DISKOMINFO
				jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	0		DISKOMINFO
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP	0	0%	DISKOMINFO
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	0		DISKOMINFO

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD			
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Jumlah Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam Koperasi pada tahun yang di laporkan	1	0%	DKUMKMP			
					Jumlah Usaha Simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	478		DKUMKMP			
			2	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor Kas Usaha Simpan Pinjam pada tahun yang dilaporkan	0	0	DKUMKMP			
					Jumlah Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam pada Tahun yang dilaporkan.	0		DKUMKMP			
			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi	91	19%	DKUMKMP			
					Jumlah Koperasi yang ada	478		DKUMKMP			
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya	0	0	DKUMKMP			
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Ada	478		DKUMKMP			
			5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	12,55%	DKUMKMP			
					Jumlah Koperasi yang ada	478		DKUMKMP			
						6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian	60	12,55%	DKUMKMP

	keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Anggota Koperasi yang ada	478	12,55%	DKUMKMP
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	0	0	DKUMKMP
		Jumlah Koperasi yang Ada	478		DKUMKMP
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	tidak perlu diisi	0	0	DKUMKMP
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah di terbitkan sertifikat NIK	73	15,27%	DKUMKMP
		Jumlah Koperasi yang ada	478		DKUMKMP
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pembiayaan	1	0,21%	DKUMKMP
		Jumlah Koperasi yang ada	478		DKUMKMP
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang di berikan dukungan Fasilitas Pemasaran	2	0,42%	DKUMKMP
		Jumlah Koperasi yang ada	478		DKUMKMP
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingankielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	60	12,55%	DKUMKMP

				Jumlah Koperasi yang ada	478		DKUMKMP	
			13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	2	0,42%	DKUMKMP
					jumlah koperasi yang ada	478		DKUMKMP
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	9571	35%	DKUMKMP
					Jumlah Wirausaha yang ada	27542		DKUMKMP
			2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah Usaha Mikro yang diinput ke dalam sistem data Online (ODS)	54391	197%	DKUMKMP
					Jumlah Usaha Mikro yang ada	27542		DKUMKMP
			3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	103	0%	DKUMKMP
					Jumlah Usaha Mikro Yang ada	27542		DKUMKMP
			4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	282	1,02%	DKUMKMP
					Jumlah Usaha mikro yang belim memiliki standar	27542		DKUMKMP
			5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	309	1,12%	DKUMKMP

				Jumlah Usaha Mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	27542	100%	DKUMKMP	
			6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	90	0%	DKUMKMP
				Jumlah Usaha Mikro yang ada	27542	DKUMKMP		
			7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah Usaha Mikro yang di berikan pendampingan kelembagaan dan usaha	90	0%	DKUMKMP
					jumlah usaha mikro yang ada	27542		DKUMKMP

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	OPD	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL	1		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPT	DPMPT	
			2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPT	DPMPT	
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPT	DPMPT	
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	3	DPMPT	DPMPT
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMPT	DPMPT
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	DPMPT	DPMPT
			7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	149	DPMPT	DPMPT
			8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	4351	DPMPT	DPMPT
			9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Tahun 2020 : 1.241 Proyek PMA = 214; PMDN = 1.027	DPMPT	DPMPT
			10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	2	DPMPT	DPMPT

			11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	PMA = 22 Perusahaan; PMDN = 77 Perusahaan	DPMPT	DPMPT
			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota		8	DPMPT	DPMPT

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
IDIKATOR KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Nihil	Nihil	DPOP
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Nihil	Nihil	DPOP
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemud	31	31	DPOP
			2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Nihil	Nihil	DPOP
	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	51	51	DPOP
			2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	4	4	DPOP

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KUNCI URUSAN STATISTIK	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya buku profil daerah	ada	ada	DISKOMINFO	
			2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	0	DISKOMINFO	
			3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	0	DISKOMINFO	
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	0	DISKOMINFO	
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	0	DISKOMINFO	
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metode kegiatan statistik sektoral			DISKOMINFO
					jumlah kegiatan statistik sektoral	0	0	DISKOMINFO
			7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	jumlah metadata indikator statistik sektoral	0	0	DISKOMINFO
					jumlah indikator statistik sektral	0	0	DISKOMINFO

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KUNCI URUSAN PERSANDIAN	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	jumlah kegiatan strategis teramankan	0	0	DISKOMINFO
				jumlah kegiatan strategis yang ada	0	DISKOMINFO		
			2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat eletronik atau aplikasi penyandian	12	0	DISKOMINFO
					jumlah SE yang ada	102		DISKOMINFO
			3	Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jmlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dngan resiko kategori rendah	0	0	DISKOMINFO
					jumlah SE yang ada	0		DISKOMINFO
			4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	jumlah titik teramankan	0	0	DISKOMINFO
					Jumlah titik pada HKS	0		DISKOMINFO

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
INDIKATOR KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan,	Jumlah objek PK yang diinventaris	0	0	DISDIKBUD
					Jumlah objek PK yang diamankan	0	0	DISDIKBUD
					Jumlah objek PK yang dipelihara	0	0	DISDIKBUD
					Jumlah objek PK yang diselamatkan	0	0	DISDIKBUD
					Jumlah objek PK yang dipublikasikan	0	0	DISDIKBUD
			2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK disebarluaskan	0	0	DISDIKBUD
					Jumlah objek PK dikaji	0	0	DISDIKBUD
					Jumlah objek PK dikayakan keberagamannya	0	0	DISDIKBUD
			3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	10	10	DISDIKBUD
			4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi,	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi	27	27	DISDIKBUD

			serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm disertifikasi	27	27	DISDIKBUD
				Jumlah lembaga distandarisasi	0	0	DISDIKBUD
				Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	0	DISDIKBUD
				Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	0	DISDIKBUD
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan	144	144	DISDIKBUD
				Jumlah CB dihapuskan	18	18	DISDIKBUD
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB diselamatkan	1	1	DISDIKBUD
				Jumlah CB diamankan	0	0	DISDIKBUD
				Jumlah CB dizonasi	0	0	DISDIKBUD
				Jumlah CB dipelihara	27	27	DISDIKBUD
				Jumlah CB dipugar	0	0	DISDIKBUD
		7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	0	DISDIKBUD
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB diteliti	0	0	DISDIKBUD

		Jumlah CB direvitalisasi	4	4	DISDIKBUD
		Jumlah CB diadaptasi	0	0	DISDIKBUD
9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	10	10	DISDIKBUD
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum dikelola	0	0	DISDIKBUD
		Jumlah koleksi museum diamankan	0	0	DISDIKBUD
		Jumlah koleksi museum dikembangkan	0	0	DISDIKBUD
		Jumlah koleksi museum dimanfaatkan	0	0	DISDIKBUD
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0	0	DISDIKBUD
	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	0	DISDIKBUD
12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	TIDAK PERLU DIISI	0	0	DISDIKBUD
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	7	7	DISDIKBUD
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	7	7	DISDIKBUD

15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	7	7	DISDIKBUD
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB	37	37	DISDIKBUD
		jumlah sdm Museum	0	0	DISDIKBUD
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya CB	0	0	DISDIKBUD
		Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya Museum	0	0	DISDIKBUD
		Jumlah sarana dan prasarana CB	0	0	DISDIKBUD
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana Museum	0	0	DISDIKBUD
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	0	DISDIKBUD

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan pendudu	Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan diwilayahnya (dalam eksamplar)	1469	0,21%	ARPERPUS
				jumlah penduduk diwilayahnya (dalam jiwa)	697.079	DISDUKCAPIL		
			2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	6%	ARPERPUS	
					jumlah penduduk diwilayahnya	697.079	DISDUKCAPIL	
			3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan diwilayahnya	0,003	ARPERPUS	
					jumlah penduduk diwilayahnya (dalam jiwa)		ARPERPUS	
			4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	jumlah perpustakaan esuai standar nasional perpustakaan	0,0018	ARPERPUS	
					jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya	276	ARPERPUS	
			5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	29	29	ARPERPUS
			2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa				0	0	ARPERPUS
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)				504	504	ARPERPUS

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD			
INDIKATOR KUNCI URUSAN KEARSIPAN	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan -	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip aktif yang dibuatkan daftar arsip	613	100%	ARPERPUS		
					jumlah seluruh arsip aktif	613		ARPERPUS		
			2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	43	41%	ARPERPUS		
					jumlah seluruh arsip inaktif	106				
			3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	0	ARPERPUS		
					jumlah seluruh arsipstatis	0		ARPERPUS		
			4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	10	18,52%	ARPERPUS		
					jumlah seluruh arsip dinamis	54				
					jumlah arsip statis pemerintah kota	0		ARPERPUS		
				2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	ARPERPUS

	uan ber negara untuk kepingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	ARPERPUS
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	ARPERPUS
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	ARPERPUS
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	ARPERPUS
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	ARPERPUS

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	982	982	DP3
			2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	jumlah TPI yang oerasional	3	100%	DP3
					jumlah seluruh TPI yang ada diwilayah kota	3		DP3
			3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	0	DP3
			4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	0	0	DP3
			5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahu	120.158.720	120.158.720	DP3

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KUNCI URUSAN PARIWISATA	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	47	47	DPOP	
			2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	17	17	DPOP	
			3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub	50	50	DPOP	
			4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		NIHIL	NIHIL	DPOP	
			5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri yang terlaksana di dalam negeri		6	6	DPOP	
			6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		NIHIL	NIHIL	DPOP	
			7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	NIHIL	NIHIL	DPOP	
			8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi		100	1,89%	DPOP
					jumlah tenaga kerja pariwisata		5281		DPOP
			9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan		125	100%	DPOP
jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		125			DPOP				
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2	2	DPOP				

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	CAPAIAN	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KINERJA URUSAN PERTANIAN	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	10 unit	10 unit	DP3	
			2	Prasaran pertanian yang digunakan Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	nihil	nihil	DP3	
			3	Penerbitan izin usaha pertanian Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	nihil	nihil	DP3	
			4	Persentase prasarana yang digunakan	jumlah prasarana yang aktif digunakan	nihil	nihil	DP3
					jumlah prasarana yang dibangun	nihil	nihil	DP3
			5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	jumlah usaha yang difasilitasi	nihil	nihil	DP3
					jumlah usulan usaha pertanian	nihil	nihil	DP3
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	jumlah area yang dapat ditanggulangi	nihil	nihil	DP3
					luas area terkena bencana	nihil	nihil	DP3

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
URUSAN KEHUTANAN		URUSAN KEHUTANAN	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	NIHIL	NIHIL	DLH
			2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	NIHIL	NIHIL	DLH
			3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	NIHIL	NIHIL	DLH
			4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	NIHIL	NIHIL	DLH

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1	perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	0	DKUMKMP

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD		
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERDAGANGAN	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			DISDAG		
				a. Pusat perbelanjaan	jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan kurang dari 5 hari kerja	NIHIL	0%	DISDAG	
					Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	NIHIL	0%	DISDAG	
				b. Toko swalayan	jumlah izin toko swalayan yang ditebitkan kurang dari 5 hari kerja	NIHIL	0%	DISDAG	
					jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	NIHIL	0%	DISDAG	
				2	Persentase penerbitan TDG	jumlah penerbitan TDG kurang dri 5hari kerja	NIHIL	0%	DISDAG
						jumlah permohonan penerbitan TDG	NIHIL	0%	DISDAG
				3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	jumlah penerbitan TDG	0	0%	DISDAG
						jumlah gudang yang ada dikota	60		DISDAG
							4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :	

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD		
			5	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	jumlah SPTW untuk penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara legkap dan benar	NIHIL	0%	DISDAG	
					jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	NIHIL		DISDAG	
				b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	jumlah SPTW untuk penerima lanjutan Waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara legkap dan benar	NIHIL	0%	DISDAG	
					jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	NIHIL		DISDAG	
				c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar neger	jumlah SPTW untuk penerima lanjutan Waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara legkap dan benar	NIHIL	0%	DISDAG	
					jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	NIHIL		DISDAG	
				Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bhan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kota	NIHIL	0%	DISDAG	
					jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	NIHIL		DISDAG	
				6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	jumlah SKA yang terbit kecil dari 1 hari kerja (1x24 jam)	2433	100%	DISDAG
							jumlah permohonan penertiban SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar		2433

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
			7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$		DISDAG	
					$K =$ Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	100%	DISDAG
					$a =$ Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)	0.5	0.5	DISDAG
					$b =$ sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	0.5	0.5	DISDAG
			8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan poko	NIHIL	NIHIL	DISDAG
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$x = a/b \times 100\%$	0,52%	0,52%	DP3
					$X =$ Persentase jumlah pupuk yang disalurkan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	92,21	92,21	DP3
					$a =$ Jumlah pupuk yang disalurkan	1479,26	1479,26	DP3
					$b =$ Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)	5047,425	5047,425	DP3
					$c =$ RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	5608,25	5608,25	DP3

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang tahun berjalan	2068	32,09%	DISDAG
					jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota	6445		DISDAG
			2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	NIHIL	0%	DISDAG
					total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	NIHIL		DISDAG

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0%	DKUMKMP
					jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0		DKUMKMP
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK -	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan :	20%	50%	DKUMKMP
					a) Tersusunnya naskah akademik (30%)	0		DKUMKMP
					b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)	20		DKUMKMP
					c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)	0		DKUMKMP
					d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	0		DKUMKMP
					e) Penetapan Perda RPIK (10%)	0		DKUMKMP
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0%	DKUMKMP

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH		ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
		menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	4	0%	DKUMKMP
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0%	DKUMKMP
					jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0		DKUMKMP
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaankawasan industri di Kab Kota SIINas	68	7,54%	DKUMKMP
					total poulasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawaan industri di kota	902		DKUMKMP

URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
URUSAN	NO	IKK OUTPUT	NO IKK	INDIKATOR/ RUMUSAN MASALAH	ISIAN DATA	CAPAIAN	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI TRANSMIGRASI	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	JELAS	BUP	BUP	-
	2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	2	JELAS	BUP	BUP	-
	3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	3	JELAS	BUP	BUP	-



LAMPIRAN 2.2.2



2.2.2 LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	10.965	41,88%	Disdik
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan	26.182		Capil
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD	71.729	90,65%	Disdik
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan	79.125		Capil
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Tingkat SMP	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP	32.962	94,06%	Disdik
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan	35.043		Capil
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan SD dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan.	4.786	3,46%	Disdik
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan	138.282		Disdik

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN	1	Rasio daya tampung rumah sakit	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kota	1.811	0,26%	DKK
			Jumlah Penduduk di Kota	697.079		Capil
	2	persentase RS rujukan tingkat kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	13	81,25%	DKK
			Jumlah RS di Kota	16		DKK
	3	persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12.643	93,92%	DKK
			jumlah ibu hamil di Kota	13.461		DKK
	4	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	12.248	93,22%	DKK
			jumlah ibu bersalin di Kota	13.139,00		DKK
	5	persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	12.127	99,09%	DKK

		Jumlah bayi baru lahir di Kota	12.238		DKK
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	36.419	61,39%	DKK
		Jumlah balita di Kota	59.324		DKK
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	14481,000	71,45%	DKK
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota	20.267,00		DKK
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	142.028,00	30,93%	DKK
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota	459.137		CAPIL
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12.988	26,26%	DKK
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di Kota	49.459		CAPIL
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.138,0	20,21%	DKK
		Jumlah penderita hipertensi di Kota	173.828,00		DKK
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.223,00	51,10%	DKK

		Jumlah penderita DM di Kota	16.092,00	91,10%	DKK
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	550	75,24%	DKK
		jumlah penderita ODGJ di kota	731		DKK
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.844,0	38,44%	DKK
		Jumlah penderita TBC di Kota	10.000		DKK
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	10.310	58,39%	DKK
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota	17.657		DKK

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	621	7,14%	DPU
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	8.694		DPU
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota (m)	11.618	2534,36%	DPU
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota (m)	458		DPU
	3	rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha)	195	180,00%	DPU
			luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang ditingkatkan (ha)	137		DPU
			luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha)	58		DPU
			luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha)	195		DPU
			luas daerah irigasi kewenangan kota.	325		DPU

	4	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kota	673.543	285,05%	DPU
			jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kota	236.293		CAPIL/DISPERKIM
	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	0	4,36%	PERKIM
			jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di PLT	5.493		PERKIM
			jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD	3.333		PERKIM
			Jumlah rumah di kota	202.359		DISPERKIM
	6	rasio kepatuhan IMB kota	jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	138.266	100,00%	DPMPT
			jumlah IMB yang berlaku	138.266		DPMPT
	7	tingkat kemantapan jalan kota	panjang jalan kewenangan KOTA yang mantap	461893	92,16%	DPU
			panjang jalan keseluruhan di wilayah kota	501.180		DPU

8	rasio tenaga operator tekniS analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis analis	405	2,16%	DPU
		jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis analis diwilayah kota	18.775		DPU
9	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	0	0,00%	DPU
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		DPU

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana upaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	NIHIL	0,00%	PERKIM	
			jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun 2020	NIHIL		PERKIM	
	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan	NIHIL	0,00%	PERKIM	
			rumah tangga penerima subsidi uang sewa	NIHIL		PERKIM	
			rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	NIHIL		PERKIM	
			jumlah total rumah tangga terkena relokasi program PEMDA yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	NIHIL		PERKIM	
	3	presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani	luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha yang ditangani	0	0	PERKIM	
			luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha	5		PERKIM	
		4	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	jumlah unit rumah tidak layak huni	578	0,00%	PERKIM

		jumlah total unit rumah kota	202.539	0,23%	PERKIM
5	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum)	jumlah unit rumah yang sedang di bangun terfasilitasi PSU	33.832	16,70%	PERKIM
		jumlah unit rumah di Kota	202.539		PERKIM

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	jumlah pengaduan yang terselesaikan	4.008	85,22%	SATPOL PP
			jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	4.703		SATPOL PP
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang di tegakkan	26	100,00%	SATPOL PP
			jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi	26		SATPOL PP
	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100		BPBD
	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100		BPBD
	5	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.246		BPBD
6	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran dikota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah	ADA		BPBD	
		jumlah layanan pemadaman di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembina dinas kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah.	6		BPBD	

		jumlah kejadian kebakaran di kota			BPBD
	7	waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	rata rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan , penyiapan tim dan peralatan,jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran		BPBD

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		42,78%	DINSOS
			PMKS Anak	265		DINSOS
			Lanjut usia terlantar	44		DINSOS
			Penyandang Diasabilitas	304		DINSOS
			PMKS Tuna Sosial	339		DINSOS
			populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			DINSOS
			PMKS Anak (300 orang)	300		DINSOS
			, Lanjut usia terlantar (39.229 orang)	39,229		DINSOS
			Penyandang Diasabilitas (1547 orang)	1547		DINSOS

		Tuna Sosial (339 orang)	339		DINSOS
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah upaten/kota	jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	358	70,3%	DINSOS
		populasi korban bencana alam dan sosial di daerah upaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana daerah kota	509		DINSOS

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA TENAGA KERJA	1	persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	jumlah kegiatan keseluruhan yang di laksanakan yang mengacu ke RTKD	29	121%	DISNAKER
			jumlah kegiatan keseluruhan yang di laksanakan di kota	24		DISNAKER
	2	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	198	0,42%	DISNAKER
			jumlah tenaga kerja keseluruhan	47.338		DISNAKER
	3	tingkat produktifitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	83.604.890.000.000,00	176612636782,29%	BAPPEDA
			jumlah tenaga kerja	47.338		DISNAKER
	4	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur skala Upah, dan terdaftar beserta BPJS Ketenagakerjaan)	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	2.812	100%	DISNAKER
			jumlah perusahaan	2.812		DISNAKER
	5	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah upaten/Kota	jumlah pencaker yang ditempatkan	937	22%	DISNAKER
			jumlah pencaker yang terdaftar	4.312		DISNAKER

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	4.905.426.711,00	0,46%	BPKD	
			jumlah seluruh belanja langsung di APBD	1.055.412.233.586,01		BPKD	
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait upaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi	100	0,04%	DP3AKB	
			jumlah anak(penduduk usia kurang dari 18 tahun)	228.174		CAPIL	
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	39	0,01%	DP3AKB	
			jumlah penduduk perempuan	340.436		CAPIL	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	97.805	122%	DP3
				Jumlah kebutuhan pangan	80.000		DP3

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
URUSAN PERTANAHAN	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	NIHIL	0%	DPPR
			seluruh luas tanah yang di berikan izin lokasi	NIHIL		DPPR
	2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	3	100%	DPPR
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	3		DPPR
	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi	0	0%	DPMPPT
			luas izin lokasi yang diterbitkan	27,386,782 m2		DPMPPT
	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5ha	NIHIL	0,00%	DPPR
			jumlah penerima tanah obyek land reform	NIHIL		DPPR
	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	13.678.565	100%	DPPR
			luas izin membuka tanah yang diterbitkan			

				13.678.565		DPPR
	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	17	100%	DPPR
			jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	17		DPPR

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah upaten/kota	IKLH kota = (IKA 30%)+(IKD 30%)+(ITH 40%)		63,52%	DLH
			IKA=Indeks Kualitas Air,	40,9		
			IKD= Indeks Kualitas Udara,	88,92		
			ITH= Indeks Tutupan Hutan	55,4		
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota	total volume sampah yang dapat ditangani	132.695,75	75,45%	DLH
			total volume timbunan sampah kota	175.865,25		DLH
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan ,dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kota	68	100%	DLH
			usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	68		DLH

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	484.082	99,3%	DISDUKCAPIL
			Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas	487.392		DISDUKCAPIL
	2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Anak Usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	132.570	63,2%	DISDUKCAPIL
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	209.691		DISDUKCAPIL
	3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah anak Usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	212.445	93,1%	DISDUKCAPIL
			Jumlah anak usia 0-18 Tahun	228.174		DISDUKCAPIL
	4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	9	26,5%	DISDUKCAPIL
			Jumlah OPD	34		ORTAL

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun	NIHIL	0%	BAG PEMERINTAHAN
			jumlah desa tertinggal (per awal tahun)	NIHIL		BAG PEMERINTAHAN
	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan indeks desa membangun pertahun	NIHIL	0%	BAG PEMERINTAHAN
			jumlah desa berkembang per awal tahun	NIHIL		BAG PEMERINTAHAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	2,56 (Sumber Perwakilan BKKBN Prov Kaltim)		DP3AKB
	2	persentase pemakai KB moderen	jumlah pesrta KB aktif modern	72,843	70,61%	DP3AKB
			jumlah pasangan usia subur	103,169		DP3AKB

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
KINERJA KUNCIURUSAN PERHUBUNGAN	1	Rasio konektivitas upaten/Kota	Rasio konektivitas upaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$	66,67		DISHUB

	2	V/C Ratio di Jalan upaten/Kota	V/C ratio jalan di kota	0,62		DISHUB
--	---	--------------------------------	-------------------------	------	--	--------

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh kominfo	34	1	DISKOMINFO
			jumlah OPD	34		ORTAL
	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara onlinedan terintegrasi		0,00%	DISKOMINFO
			jumlah layanan publik	47		ORTAL
	3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah upaten/Kota	jumlah masyarakat yang mrnjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kota		0,00%	DISKOMINFO
			jumlah penduduk	697.079		DISDUKCAPIL

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD	
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan aset	87	18,20%	DKUMKMP	
			jumlah seluruh koperasi	478		DKUMKMP	
	2	meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	9.571	34,75%	DKUMKMP	
			jumlah usaha mikro keseluruhan	27.542		DKUMKMP	
	INDIKATOR KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL	1	Persentase peningkatan investasi diupaten/kota	jumlah investasi tahun 2020	14.369.160.520.000	1436916051999900,00%	DPMPT
				jumlah investasi tahun 2019)dikota	2.875.120.100.000		DPMPT
jumlah investasi tahun 2019 di kota				2.875.120.100.000	DPMPT		

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda 16-30 tahun yang berwirausaha di kota	0	0,00%	DPOP
			jumlah pemuda umur 16-30 di kota	169.465		DISDUKCAPIL
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Jumlah pemuda 16-30 tahun yang yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota	0	0,00%	DPOP
			jumlah pemuda umur 16-30 tahun di kota	169.465		DISDUKCAPIL
	3	peningkatan prestasi olahraga	jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	0,00%	DPOP

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KUNCI URUSAN STATISTIK	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	34	100%	DISKOMINFO
			jumlah OPD	34		ORTAL
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	34	100%	DISKOMINFO
			jumlah OPD	34		ORTAL
INDIKATOR KUNCI URUSAN PERSANDIAN	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi			DISKOMINFO
			jumlah area penilaian			DISKOMINFO
INDIKATOR KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	145	100%	DISDIKBUD
			jumlah cagar budaya yang terdata	145		DISDIKBUD

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
URINDIKATOR KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	nihil		ARPERPUS
				nihil		ARPERPUS
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	nihil		ARPERPUS
INDIKATOR KUNCI URUSAN KEARSIPAN	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan -	$T = (a + i + s + j) / 4$	40		ARPERPUS

	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$	0		ARPERPUS
INDIKATOR KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh upaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan	4,684,7		DP3
			Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	4,409,2		DP3
			Jumlah Total Produksi budidaya	275,5		DP3
INDIKATOR KUNCI URUSAN PARIWISATA	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	jumlah wisatawan tahun 2020	16.510	-71%	DPOP
			jumlah wisatawan tahun 2019	56.577		DPOP

2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke upaten/Kota	jumlah wisatawan tahun 2020	1089079	-63%	DPOP
		jumlah wisatawan tahun 2019	2935138		DPOP
3	Tingkat Hunian Akomodasi	jumlah kamar yang terjual	574.798	26%	DPOP
		jumlah kamar yang tersedia	2.249.702		DPOP
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp 2.031,89		BAPEDDA
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.884.864.500		BPKD

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD	
DIKATOR KUNCI URUSAN PERTANIAN	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	17.474,8	360,2%	DP3	
			luas panen	4.852		DP3	
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2020 - jumlah kejadian / kasurs penyakit hewan menular 2019				
			jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020	11	-8,33%	DP3	
			jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2019	12		DP3	
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota	jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	BUP		DKUMKMP	
			jumlah petrusahaan pemanfaatan panass bumi	BUP		DKUMKMP	

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERDAGANGAN	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	71	29,96%	DISDAG
			Jumlah pelaku usaha di wilayah kota	237		DISDAG
	2	persentase kinerja realisasi pupuk	realisasi	1.479,26	26,38%	DP3
			RDKK	5.608		DP3
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	2.068	32,09%	DISDAG
			jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota	6.445		DISDAG

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI PERINDUSTRIAN	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di upaten/Kota	jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020	0		DKUMKMP
			jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019	0		DKUMKMP
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK -		0		DKUMKMP
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	26	2,88%	DKUMKMP
			jumlah izin yang dikeluarkan	902		DKUMKMP
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0		DKUMKMP
			jumlah izin yang dikeluarkan	0		DKUMKMP
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0		DKUMKMP

URUSAN	NO	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
		Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah upaten/Kota	jumlah izin yang dikeluarkan	0		DKUMKMP
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri :	0		DKUMKMP
			Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	0		DKUMKMP
			Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	0		DKUMKMP
			Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	0		DKUMKMP
			2) Kelengkapan informasi industri meliputi :	0		DKUMKMP
			Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	0		DKUMKMP
			Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	0		DKUMKMP



LAMPIRAN 2.2.3



2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN

URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	436.007.782.330,97	17,87%	BPKD
			jumlah APBD	2.440.084.440.033,910		BPKD
	2	Rasio PAD	Jumlah PAD	564.653.640.966,59	0,00%	BPKD
			Jumlah PRDB non migas	0		BAPEDDA
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL 3		INSPEKTORAT

	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	LEVEL 3		INSPEKTORAT
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	jumlah belanja urusan pemerintahan- transfer expenditures	1.303.284.174.146,35	53,41%	BPKD
			jumlah belanja APBD	2.440.084.440.033,910		BPKD
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	INSPEKTORAT

URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2020	0	0%	ADBANG
			jumlah kontrak keseluruhan tahun 2020	0		ADBANG
	2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	145	1,70%	PBJ
			jumlah pengadaan yang dilakukan dengan tanpa metode kompetitif	8522		PBJ
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	758.572.000.000	68%	PBJ
			total belanja langsung	1.120.055.401.292		PBJ

URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas	1.187,0	103%	BKPSDM
			seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kbawah	1.153,0		BKPSDM
	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	360,0	15%	BKPSDM
			seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.340,0		BKPSDM
	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	53,0	14,72%	BKPSDM
			seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS yang termasuk guru dan tenaga kesehatan)	360,0		BKPSDM

URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	((nilai absolut dari total belanja dalam realisasi))	1.999.708.867.025,30	74,08%	BPKD
			total belanja APBD	2.699.395.088.325		
	2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	((nilai absolut total PAD dalam realisasi))-1	504.358.517.346,51	70,54%	BPKD
			total PAD dalam APBD	715.000.000.000		BPKD
	3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap?	YA		BPKD
			2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	TIDAK		BPKD
			3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	YA		BPKD
			4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	YA		BPKD

URUSAN	NO	IKK FUNGSI PENUNJANG	RUMUS/PERSAMAAN	ISIAN DATA	CAPAIAN KINERJA	OPD
	4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	nilai realisasi SILPA	323.831.718.089	11,61%	BPKD
			Total belanja anggaran tahun 2019	2.789.437.578.346		BPKD



KUBANGUN, KUJAGA, KUBELA



BALIKPAPAN 2020